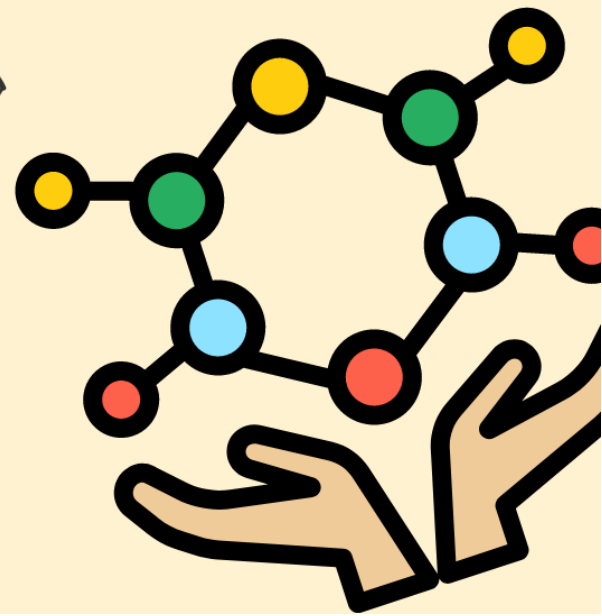
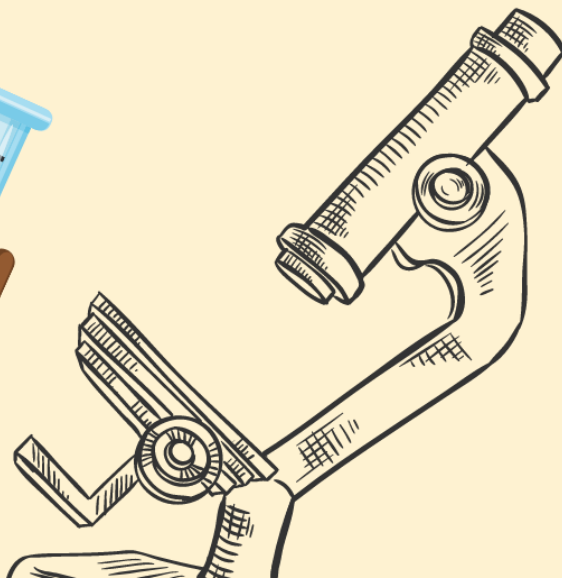
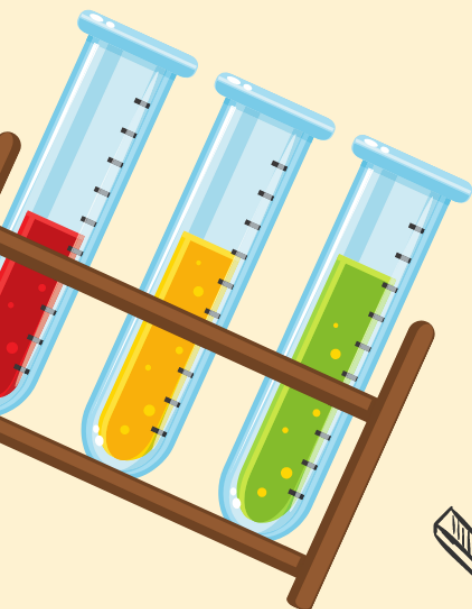
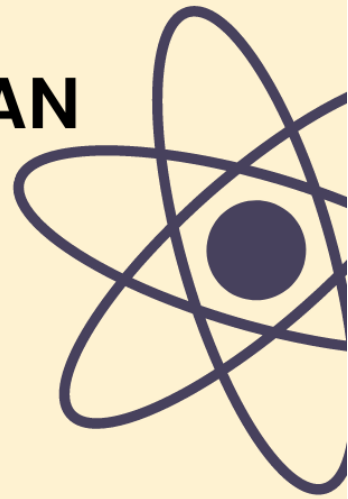


LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2021

**PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

Penanggung Jawab

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

Ketua

Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt, Ph.D

Anggota

1. Rina Azhariyati, S.Si., Apt.
2. Dra. Arum Prasetyaningtyas, Apt, M.Si
3. Henry Handoyo, S.Si, M.Si
4. Dra. Sitoresmi Triwibowo
5. Lilik Budiati, S.Si, Apt
6. Wiratmoko Dani Kusuma, S.Si.
7. Endah Kristiana, S.Si, M.Si
8. Nur Aini, S.Si, M.Sc
9. Prima Purnama, S.Farm
10. Mia Riska, S.Si
11. Adinda, ST
12. Garit Bian Priangga. S, A.Md

KATA PENGANTAR



Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja PPPOMN triwulan III tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja triwulan III disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Tahun 2021.

Laporan Kinerja triwulan III tahun 2021 menyajikan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis PPPOMN pada triwulan berikutnya dapat tercapai secara optimal. Disamping sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja PPPOMN ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas perencanaan dan pencapaian kinerja PPPOMN.

Capaian target ini merupakan hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PPPOMN. Kami berharap penyajian Laporan Kinerja PPPOMN triwulan III tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Jakarta, 19 Oktober 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA.....	2
.....	3
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN.....	7
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	8
BAB I - PENDAHULUAN.....	10
1.1 Tugas dan Fungsi	10
1.2. Struktur Organisasi	12
1.3 Permasalahan Utama	15
BAB II - PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Visi, Misi dan Tujuan	16
2.2 Sasaran Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	28
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021	32
3.2 Capaian Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2021	63
3.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	71
BAB IV - PENUTUP.....	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	74
LAMPIRAN.....	76
LAMPIRAN.....	76
LAMPIRAN.....	76
LAMPIRAN.....	76
LAMPIRAN.....	76
LAMPIRAN.....	76
LAMPIRAN.....	76
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 2 PPPOMN	19
Tabel 2. Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Strategis dan IKSS di Pusat Pengembangan pengujian Obat dan Makanan Nasional Sesuai Renstra PPPOMN 2020-2024	26
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPPOMN.....	28
Tabel 4. Usulan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPPOMN.....	30
Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Triwulan III Tahun 2021	32
Tabel 6. Responden SKM Menurut Tabel Krejcie & Morgan.....	37
Tabel 7. Nilai SKM Tiap Layanan pada Triwulan III Tahun 2021	37
Tabel 8. Nilai SKM Tiap Unsur Layanan pada Triwulan III Tahun 2021.....	38
Tabel 9. Saran dan Masukan Responden Pelayanan Publik pada Triwulan III Tahun 2021	38
Tabel 10. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Triwulan III Tahun 2021	46
Tabel 11. Persentase penyelesaian sampel pengujian dan pelulusan	50
Tabel 12. Persentase sampel pengujian yang ditindaklanjuti tepat waktu.....	50
Tabel 13. Persentase sampel pengujian dan pelulusan produk biologi, sampel pengujian obat dan makanan, serta sampel PQ-WHO secara keseluruhan yang ditindaklanjuti tepat waktu.....	51
Tabel 14. Data spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19 Triwulan III tahun 2021	52
Tabel 15. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	64
Tabel 16. Capaian Kegiatan Per Indikator	66
Tabel 17. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN	12
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan	13
Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	14
Gambar 7. Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024	16
Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM RI.....	18
Gambar 9. Peta Strategi Level 2 PPPOMN	18
Gambar 10. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	76
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	78
Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	79
Lampiran 4. Surat perubahan target IKM	80
Lampiran 5. Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2020 Tahap IV94	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon II di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja PPOMN tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas PPOMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta transparansi penggunaan anggarannya, mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2021, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPOM, PPOMN meng-*cascading* Sasaran Strategis BPOM, melalui pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis PPOMN dan 17 indikator kinerja yang disusun berdasarkan Peta Strategi *Balance Score Card* dengan 3 level perspektif yaitu: **1) Stakeholder Perspective, 2) Internal Process Perspective, 3) Learning & Growth Perspective** dengan rincian sebagai berikut:

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja
Stakeholder	Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian 2. Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium BPOM
	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPOMN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPOMN
Internal Process	Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar kemampuan laboratorium
	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan 2. Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan
	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar

	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik PPOMN
	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif
<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPOMN	1. Indeks RB PPOMN 2. Nilai AKIP PPOMN
	Terwujudnya SDM PPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPOMN
	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal
	Terkelolanya keuangan PPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPOMN
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPOMN

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya PPOMN memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp105.370.538.000,- (seratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

Pada triwulan III terdapat pemotongan anggaran APBN IV yang cukup besar yaitu sebesar Rp 16.364.419.000,00 (Enam belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribuan rupiah) sehingga dilakukan penyesuaian target di beberapa output karena adanya perubahan anggaran pada 4 (empat) indikator yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP; 2) Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan; 3) Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar; 4) Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif. Selain itu, menindaklanjuti adanya surat revisi target indikator pada level *Learning Growth* (LG) dari unit penanggungjawab terkait, maka diperlukan penyesuaian target pada indikator tersebut.

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembandingan;
- b. pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembandingan;
- c. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional;
- d. pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembandingan;
- g. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) terdiri atas:

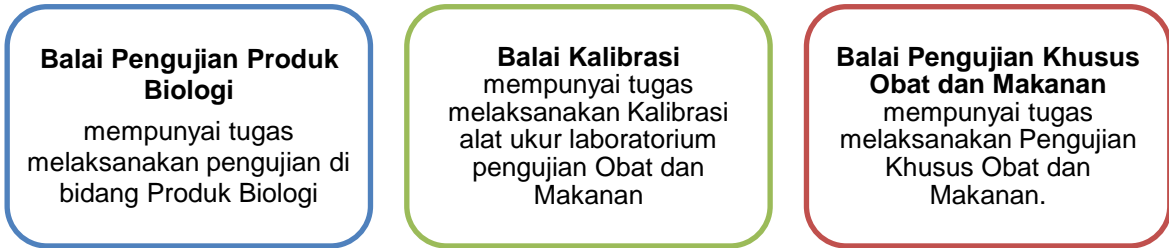
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2. 12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu Pengelompokan uraian fungsi PPPOMN terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi obat dan bahan obat; dan
 - b) Subkelompok substansi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- 2) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
 - b) Subkelompok substansi kosmetik.
- 3) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia pangan olahan dan air, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi mutu dan gizi; dan
 - b) Subkelompok substansi cemaran, residu, dan bahan berbahaya.
- 4) Kelompok substansi pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen kesehatan; dan
 - b) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat tradisional, kosmetik, dan pangan.
- 5) Kelompok substansi pengembangan baku pembandingan, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi baku pembandingan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan obat tradisional; dan
 - b) Subkelompok substansi baku pembandingan suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Secara umum, masing-masing Kelompok substansi dikoordinir oleh Koordinator jabatan fungsional. Koordinator tersebut melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT di lingkungan PPPOMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN, yaitu:



1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (eselon 2), Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN juga membawahi 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur organisasi PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 1. Sebagai berikut :



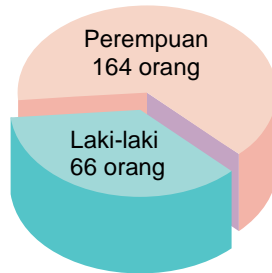
Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN
Sumber: Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020

1.2.1. Sumber Daya

1.2.1.1. Sumber Daya Manusia

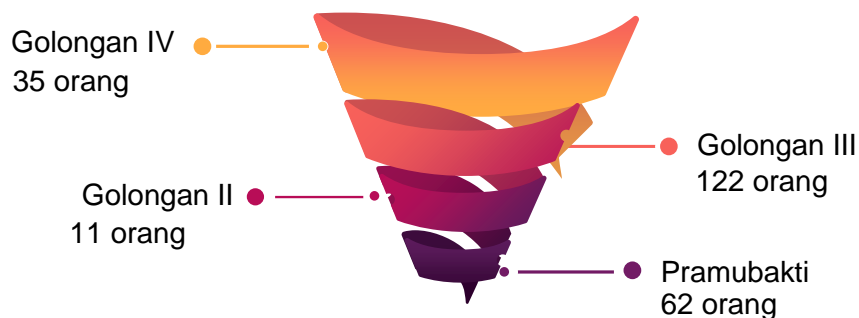
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPOMN sampai akhir Juni 2021 didukung oleh 168 orang PNS dan dibantu pramubakti sebanyak 62 orang. Profil pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, tingkat pendidikan dan umur dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

a. Berdasarkan jenis kelamin:



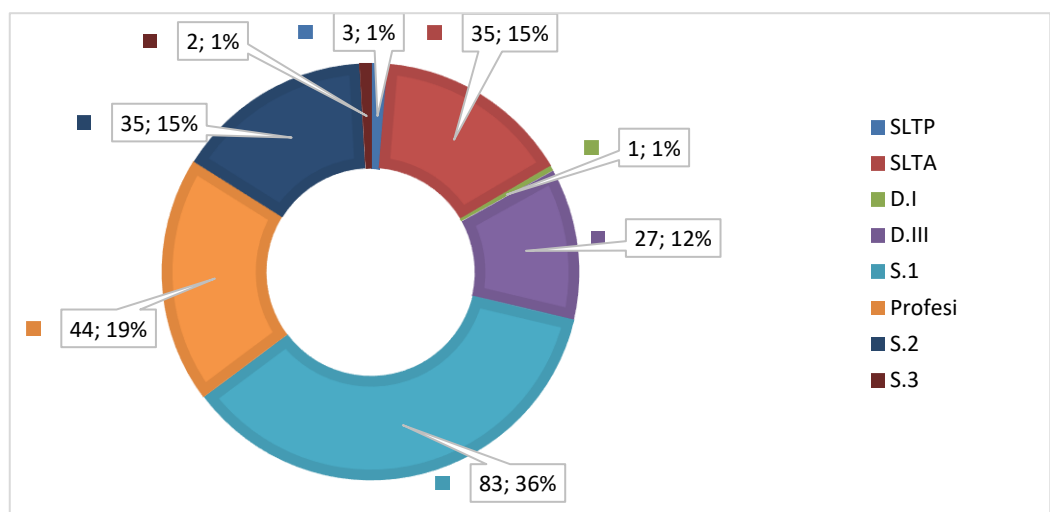
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Berdasarkan golongan:



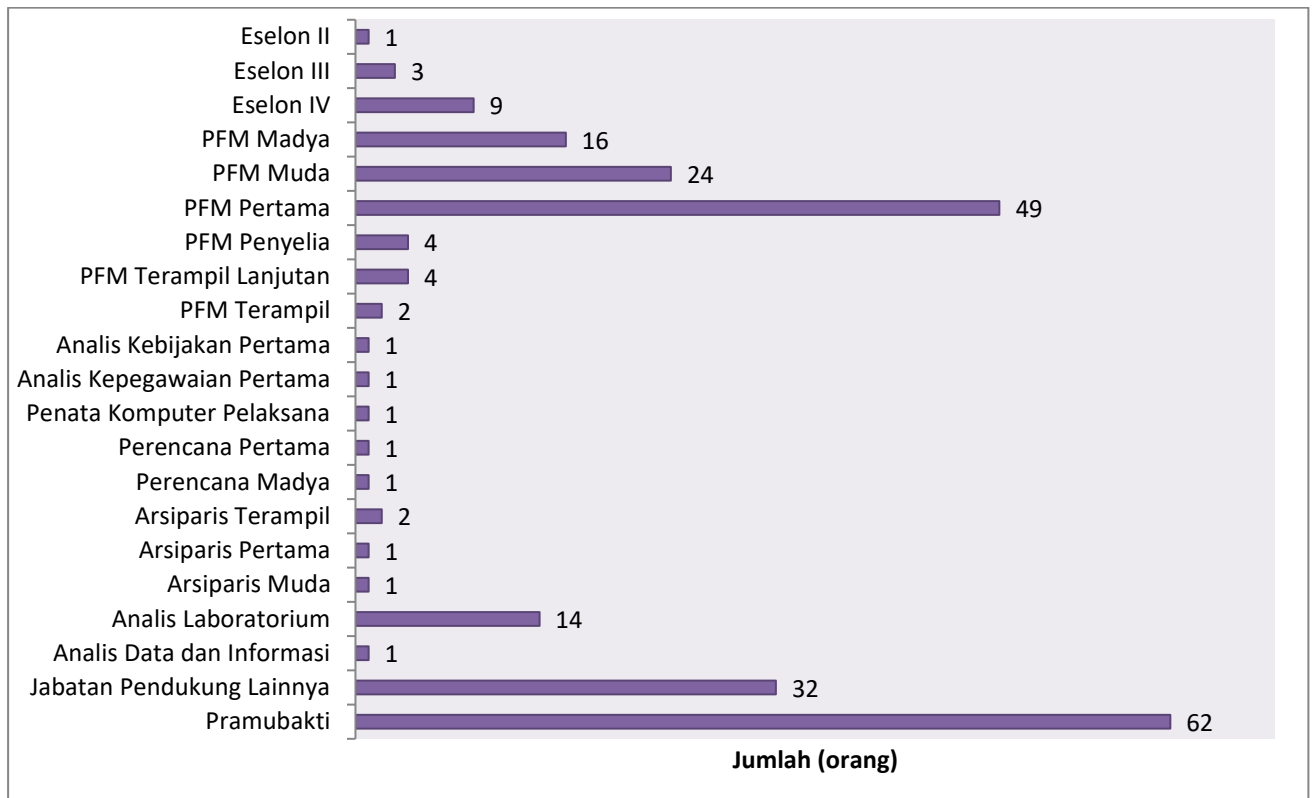
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan tingkat pendidikan



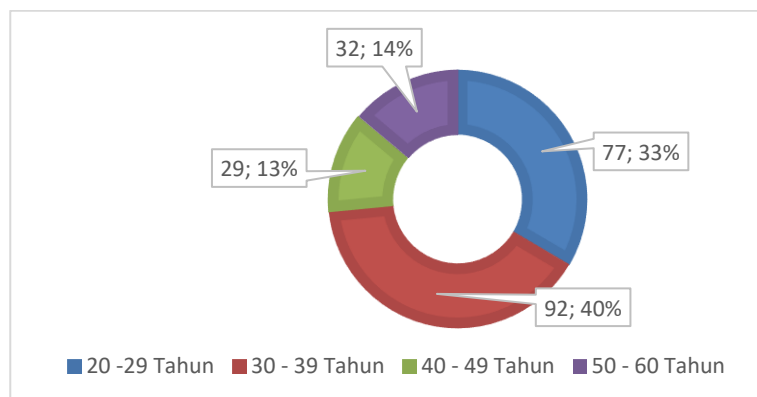
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan

d. Berdasarkan jabatan:



Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan

e. Berdasarkan kelompok umur:



Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

1.2.1.2. Anggaran

Pada tahun 2020 PPPOMN memperoleh anggaran sesuai DIPA sebesar Rp105.370.538.000,- (seratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Adanya pemotongan anggaran sesuai APBN IV, anggaran PPPOMN mengalami pemotongan sebesar Rp 16.364.419.000, 00 (Enam belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribuh rupiah) sehingga menjadi RP

89,006,119,000, 00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

1.3 Permasalahan Utama

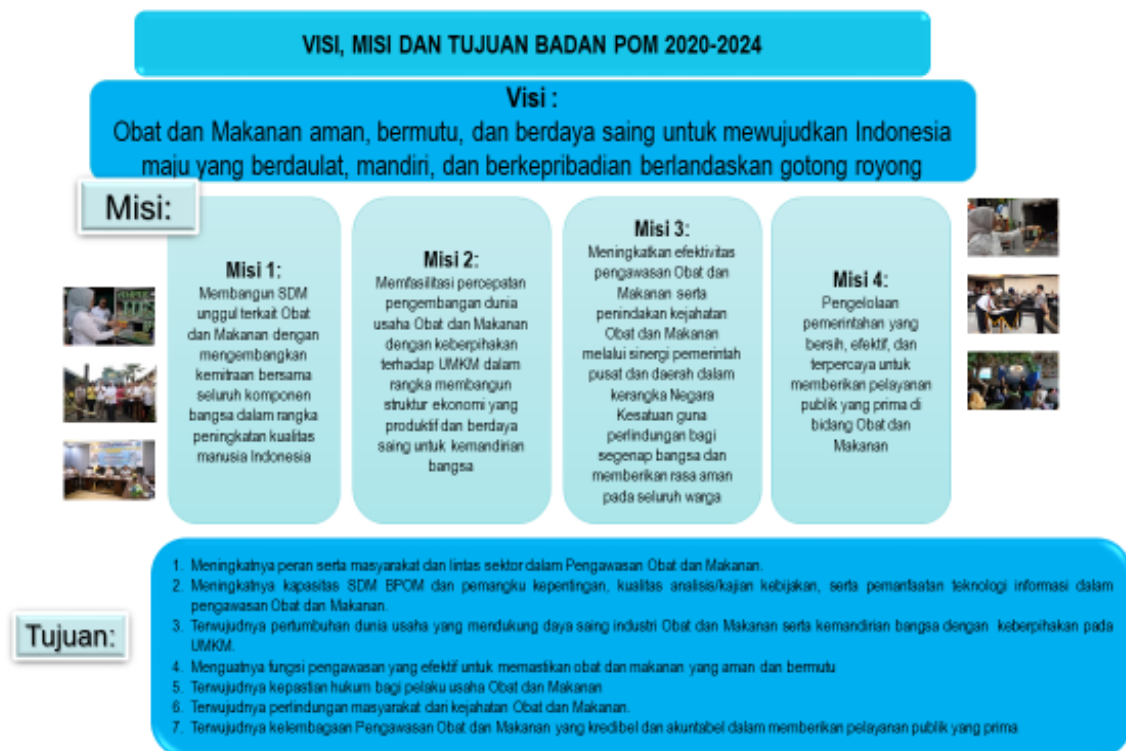
Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPPOMN sebagai berikut:

- Belum adanya dokumen *grand design* laboratorium BPOM sebagai landasan untuk perkuatan laboratorium BPOM.
- Perlunya pengawalan dalam rangka peningkatan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM.
- Masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian Obat dan Makanan, sehingga perlu peran PPPOMN yang lebih optimal.
- Terjadi perubahan kebutuhan peralatan laboratorium karena perubahan nomenklatur organisasi.
- Adanya redistribusi pegawai yang berakibat pada penyesuaian kembali pembagian tugas dan beban kerja personel.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi dan Tujuan

Visi PPPOMN sejalan dengan Visi BPOM. Visi, Misi, dan Tujuan BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024

Misi PPPOMN sebagai berikut:

1. **Memperkuat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang andal dan kredibel guna perlindungan bagi segenap bangsa**

Hasil pengujian yang valid merupakan bukti ilmiah yang akurat bagi BPOM untuk melakukan tindak lanjut Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Selain itu hasil pengujian juga harus cepat agar tindak lanjut segera dilakukan, sehingga memberikan perlindungan dan rasa aman bagi segenap bangsa dan seluruh warga. Bertambahnya jenis dan volume Obat dan Makanan, inovasi produk, berbagai bahan berbahaya dan cemaran pada kosmetik dan pangan, berbagai bahan kimia obat pada obat tradisional, tren produk bioteknologi/biosimilar, *stem cell*, nanoteknologi merupakan tantangan pengujian laboratorium BPOM. Oleh karena itu PPPOMN terus

berupaya meningkatkan kemampuan laboratorium BPOM, baik melalui pelatihan, melengkapi instrumen teknologi tinggi dan pengembangan fasilitas laboratorium. Hal ini ditunjukkan pada April 2020 PPPOMN telah membangun laboratorium *biohazard* untuk pengujian sampel Covid-19. Namun, keterbatasan anggaran merupakan kendala jika kemampuan seluruh laboratorium BPOM harus sama sehingga peningkatan akan lama. Untuk itu, BPOM mengamankan PPPOMN untuk memperbaiki/mengubah manajemen laboratorium ke arah yang lebih efektif dan efisien.

Sesuai Visi Presiden, maka BPOM perlu meningkatkan peran serta dalam mengembangkan kompetensi pengujian laboratorium eksternal baik melalui jejaring maupun pelatihan, dan mendorong partisipasi dalam uji profesiensi/uji kolaborasi, sehingga pada akhirnya pelaku usaha dapat mengawal mutu produknya sesuai ketentuan melalui pengujian di laboratorium eksternal.

2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang pengujian

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya merupakan semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang diterapkan oleh pemerintah di setiap kementerian dan lembaga untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya RB secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2020-2024. PPPOMN, sebagai salah satu unit BPOM yang memberikan 7 (tujuh) layanan publik berupa layanan pengujian dan terkait pengujian, harus terus meningkatkan kualitas layanannya melalui penerapan reformasi birokrasi.

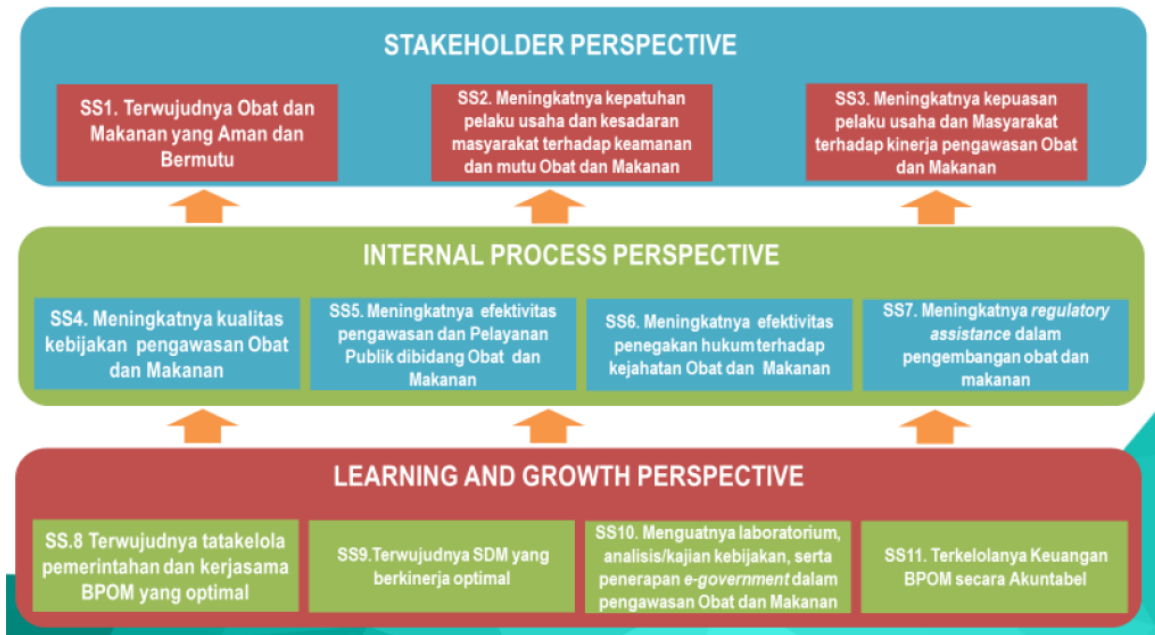
Tujuan

Tujuan PPPOMN dalam mencapai visi dan menjalankan misi PPPOMN yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM dan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan menuju standar Internasional;
2. Terwujudnya PPPOMN yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang prima.

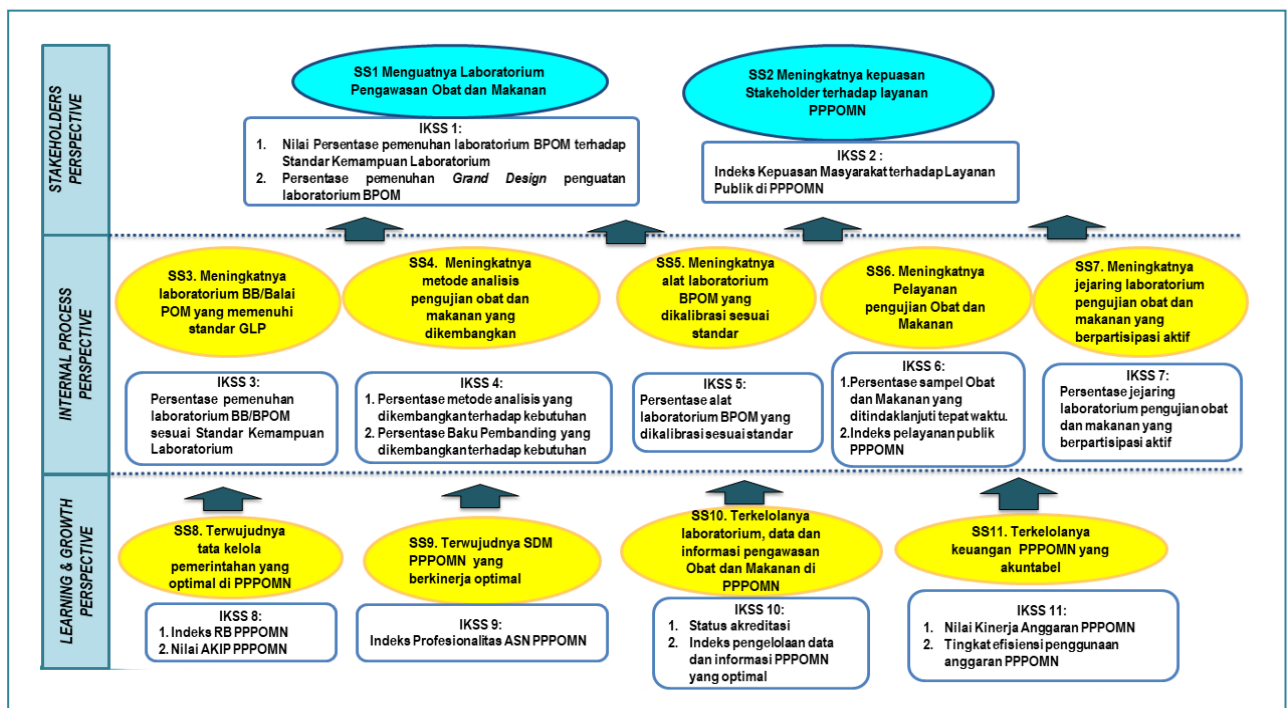
2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:



Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM RI
 Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Sasaran strategis PPPOMN 2020-2024 disusun berdasarkan peta strategi *balance score card* 3 level perspektif, dengan menurunkan sasaran strategis BPOM perspektif *learning and growth* dan indikatornya ke dalam *stakeholder perspective* peta strategi PPPOMN. Dengan sasaran strategis ini maka PPPOMN akan berkontribusi pada pengawasan Obat dan Makanan. Peta Strategi Level 2 Satker PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 9. Peta Strategi Level 2 PPPOMN
 Sumber: Renstra PPPOMN 2020-2024

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 2 PPPOMN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
PERSPEKTIF STAKEHOLDER			
SS 1	Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 1.1	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium
		IKSS 1.2	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium BPOM
SS 2	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan PPPOMN	IKSS 2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS			
SS 3	Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	IKSS 3	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar kemampuan laboratorium*
SS 4	Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	IKSS 4.1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan
		IKSS 4.2	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan
SS 5	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	IKSS 5	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar
SS 6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	IKSS 6.1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu
		IKSS 6.2	Indeks pelayanan publik PPPOMN
SS 7	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	IKSS 7	Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif
PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH			
SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	IKSS 8.1	Indeks RB PPPOMN
		IKSS 8.2	Nilai AKIP PPPOMN
SS 9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	IKSS 9	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN
SS 10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	IKSS 10.1	Status akreditasi
		IKSS 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal
SS 11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	IKSS 11.1	Nilai kinerja anggaran PPPOMN
		IKSS 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN

* Indikator Kinerja pada Renstra BPOM 2020-2024 dalam hal Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan.

1. **Stakeholder Perspective:**

a. **Sasaran Strategis-1:** Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.

Menguatnya laboratorium di lingkungan BPOM merupakan kekuatan pengawasan Obat dan Makanan terkait pengawasan *postmarket*. Hasil pengujian yang valid berperan penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar serta bukti ilmiah dalam tindak lanjut obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dan penindakan terhadap pelanggaran.

Dalam rangka memperkuat laboratorium dibutuhkan panduan untuk mengarahkan rencana penguatan laboratorium BPOM di masa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan, apa yang harus dikembangkan dan strategi yang harus dilakukan serta target setiap tahunnya. Untuk itu perlu dibuat *grand design* penguatan laboratorium BPOM tahun 2020-2030. *Grand design* disusun dengan memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Nilai persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 91% pada akhir tahun 2024;
2. Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium BPOM dengan target 40% pada akhir tahun 2024.

Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium BPOM akan muncul setelah penyusunan dokumen *grand design* pada tahun 2021.

b. **Sasaran Strategis-2:** Meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan PPPOMN.

PPPOMN sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik berkontribusi secara langsung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Saat ini terdapat 7 (tujuh) jenis layanan publik PPPOMN sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu penyediaan baku pembanding kimia, penyediaan baku mikroba, penyediaan hewan uji, layanan uji profisiensi, layanan kalibrasi alat, layanan pengujian dan layanan pelatihan.

Dalam hal pelayanan publik, PPPOMN telah berkontribusi menunjang kebutuhan baku pembanding kimia, baku mikroba dan hewan uji dalam pengawasan mutu internal di industri Obat dan Makanan maupun pada riset dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa. Layanan uji profisiensi, kalibrasi alat dan pelatihan terkait teknis laboratorium juga menunjang kegiatan *stakeholder* eksternal dari lintas K/L maupun dari laboratorium pengujian lain di luar BPOM. Demikian halnya dengan layanan pengujian yang dilakukan oleh PPPOMN. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, PPPOMN melakukan pengujian sampel spesimen Covid-19 dari berbagai pihak.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)-nya adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN dengan target 92 pada akhir tahun 2024.

2. **Internal Process Perspective:**

a. **Sasaran Strategis-3:** Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP.

PPPOMN sebagai NCL (*National Control Laboratory*) selain mengembangkan pengujian juga membina laboratorium pengujian di lingkungan BPOM dalam hal ini BB/BPOM dan Loka POM yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. PPPOMN bertanggung jawab terhadap kemampuan (kualitas dan kapasitas pengujian) laboratorium di lingkungan BPOM agar sesuai dengan standar cara berlaboratorium yang baik atau dikenal dengan *Good Laboratory Practices* dan tuntutan pengawasan. Terlebih lagi BPOM telah berkomitmen untuk mempertahankan pengakuan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dari KAN-BSN (Komite Akreditasi Nasional – Badan Standardisasi Nasional). Oleh karena itu, PPPOMN melakukan peningkatan kompetensi pengujian, mengkaji instrumen analisis, dan mendorong peningkatan ruang lingkup pengujian bagi laboratorium pengujian di lingkungan BPOM. Untuk mengetahui kemampuan laboratorium, perlu dilakukan asesmen pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium berkesinambungan dan dievaluasi menggunakan *tools* yang disusun PPPOMN dengan memperhatikan peningkatan kompetensi, ruang lingkup pengujian, dan ketersediaan alat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini menggunakan IKSS Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 90% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis-4: Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan.

Salah satu tugas dalam pengembangan pengujian PPOMN yaitu meningkatkan ketersediaan metode analisis (MA) dan baku pembanding yang dibutuhkan oleh laboratorium BPOM dalam pengujian Obat dan Makanan. Jenis produk berkembang sangat pesat, sangat banyak bahan dilarang dalam kosmetik sesuai ASEAN *Cosmetic Directive*, beragamnya bahan kimia obat dalam obat tradisional, banyaknya cemaran dalam pangan sehingga MA dan jenis baku pembanding perlu terus dikembangkan. Bahkan MA yang dikembangkan beberapa tahun lalu dapat diperbaharui/diganti sesuai perkembangan teknologi. Upaya pengembangan MA dengan membuat roadmap 5 tahun/perencanaan satu tahun bersama kedeputian atau berdasarkan prioritas terhadap produk yang memberikan dampak negatif terhadap keamanan bagi masyarakat atau kebutuhan BB/BPOM. Untuk mempercepat pengembangan dan ketahanan MA, perlu diupayakan peran serta laboratorium eksternal. Untuk mempercepat pengembangan baku pembanding dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan industri farmasi. Pengembangan MA dan baku pembanding dilakukan melalui proses validasi maupun verifikasi dan disempurnakan melalui pembahasan bersama tenaga ahli, kemudian dibahas dalam sidang pleno yang terdiri dari beberapa narasumber.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan dengan target 100% pada akhir tahun 2024;
2. Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis-5: Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar.

Laboratorium BPOM mempunyai kuantitas alat laboratorium yang sangat banyak dan tercatat sebagai BMN (Barang Milik Negara) di PPOMN maupun tersebar di 33 BB/BPOM. Alat laboratorium yang digunakan dalam pengembangan metode analisis dan pengujian harus dikalibrasi dan dipelihara. Hal ini agar hasil pengujian valid, dapat dipercaya dan sesuai persyaratan ISO-IEC 17025:2017 bahwa peralatan yang digunakan untuk pengujian harus tertelusur nilai benarnya ke satuan internasional. Dengan berkembangnya metode analisis, meningkatnya cakupan pengujian/ jumlah sampel, tuntutan kebenaran akurasi dari alat, maka jumlah alat diperkirakan terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2024, BPOM diperkirakan mempunyai alat

laboratorium sebanyak 3528 yang harus dikalibrasi untuk menjaga *performance* alat sehingga memberikan hasil pengujian yang valid. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja kegiatannya adalah Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis-6: Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan.

Perubahan OTK di BPOM sangat berpengaruh terhadap tuisi utama PPPOMN yang semula berorientasi pada pengujian berubah menjadi pengembangan. Namun, PPPOMN melakukan pengujian obat dalam rangka implementasi PQ WHO. Tuisi pengujian level Top *referral* dijalankan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dan Balai Pengujian Produk Biologi sesuai Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

Pelayanan pengujian Obat dan Makanan meliputi sampel rutin produk biologi, sampel khusus (sampel dari Kedeputian Penindakan; sampel permintaan uji konfirmasi dari Kedeputian I,II dan III, sampel pihak ketiga/kepolisian/kejaksaan), sampel rokok dan sampel obat dalam rangka PQ WHO. Hasil pengujian sampel tersebut digunakan dalam tindak lanjut pengawasan terhadap obat dan makanan tidak memenuhi syarat atau penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan Hasil uji harus cepat diperoleh untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk biologi dan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, sehingga pemenuhan time line pengujian sangatlah penting.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKSS):

1. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan target 95% pada akhir tahun 2024;
2. Indeks pelayanan publik PPPOMN dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.

e. Sasaran Strategis-7: Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif.

Jejaring laboratorium adalah wadah kerjasama laboratorium pengujian seluruh Indonesia (BPOM dan eksternal BPOM) yang menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium yang meliputi UP/kolaborasi/pelatihan/workshop/meeting/FGD yang diselenggarakan PPPOMN dengan melibatkan laboratorium lintas sektor sesuai lingkup pengujian/keahlian. Laboratorium di Indonesia cukup banyak untuk itu perlu diberdayakan dalam pengujian Obat dan Makanan, sehingga membantu pelaku usaha dalam melakukan

pengujian. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan peran serta laboratorium dan menghindari *dispute* hasil pengujian. Total jejaring laboratorium sesuai lingkup pengujian/keahlian pada periode renstra PPPOMN 2020-2024 adalah 14 jejaring. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja kegiatan (IKSS) nya adalah Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

3. **Learning and Growth Perspective:**

a. **Sasaran Strategis-8:** Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN.

Sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, BPOM senantiasa berupaya melakukan penguatan implementasi RB melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02.2.7.01.20.22 Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM. Atas dasar tersebut, PPPOMN berupaya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai RB pada 6 (enam) area perubahan dalam membangun ZI (Zona Integritas) untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik PPPOMN akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020-2024, PPPOMN senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian ZI, Opini BPK, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan evaluasi Inspektorat Utama terhadap akuntabilitas kinerja, nilai akuntabilitas PPPOMN 75,05 atau predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa PPPOMN telah cukup akuntabel dan berkinerja baik, serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal. Namun demikian, hasil yang diperoleh membuka peluang peningkatan dalam periode renstra 2020-2024 sehingga diperoleh nilai dan predikat yang lebih baik.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan : Indeks RB PPPOMN dengan target nilai 95 pada akhir tahun 2024 dan Nilai AKIP PPPOMN dengan target nilai 92 pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis-9: Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu SDM perlu diberikan pelatihan agar kompeten dan dievaluasi untuk ditingkatkan kinerjanya. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja kegiatan adalah Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN dengan target nilai 85 pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis-10: Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN.

Setelah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015, PPPOMN perlu juga menerapkan sistem mutu untuk provider uji profisiensi dan produsen bahan acuan mengacu standar ISO/IEC 17043 dan ISO/IEC 17034. Sebagai provider uji profisiensi, PPPOMN telah menyelenggarakan uji profisiensi pengujian kimia, mikrobiologi dan biologi molekuler untuk produk Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan. Untuk itu PPPOMN berupaya mendapatkan akreditasi kedua standar ISO tersebut secara bertahap dalam kurun waktu 2020-2024.

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi satu pintu sehingga tidak ada perbedaan data yang keluar dari BPOM dan memudahkan pimpinan dalam memantau kinerja setiap unit kerja serta mempercepat pelaporan kinerja BPOM, maka telah dibuat sistem data dan informasi terintegrasi yaitu BPOM *Comand Center* (BCC). Setiap Unit kerja melaporkan data dan informasi ke dalam sistem informasi yang digunakan sehingga dapat ditampilkan pada BCC. Penilaian indikator dikategorikan baik apabila data dan informasi yang dilaporkan sesuai yang ditargetkan dan sistem informasi (layanan TIK) yang dibuat telah dimanfaatkan.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Status akreditasi dengan target akreditasi PPPOMN sebagai produsen bahan acuan (ISO/IEC 17034) dan provider uji profisiensi (ISO/IEC 17043).
2. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal dengan target nilai 3 (tiga) pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel.

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang

sangat penting dan dituntut akuntabel dalam penggunaannya. Untuk itu, salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* harus menggambarkan kemampuan PPPOMN dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN dengan target nilai 96,25 pada akhir tahun 2024
2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN dengan target 93% (efisien) pada akhir tahun 2024.

Tabel 2. Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Strategis dan IKSS di Pusat Pengembangan pengujian Obat dan Makanan Nasional Sesuai Renstra PPPOMN 2020-2024

Sasaran Strategis		Target (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1. Mekuatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan						
1	Persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap standar kemampuan laboratorium	71	76	81	86	91
2	Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium BPOM	-	5	20	30	40
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN						
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	84.5	86	87.5	89	92
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP						
1	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar kemampuan laboratorium	70	75	80	85	90
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan						
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	65	74	82	91	100
2	Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	70	77	85	92	100
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar						

Sasaran Strategis		Target (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	79	87	89	92	100
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan						
1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	92	93	94	95
2	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3.91	4.06	4.21	4.36	4.51
Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif						
1	Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	43	57	71	86	100
Sasaran Strategis 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN						
1	Indeks RB PPPOMN	91	92	93	94	95
2	Nilai AKIP PPPOMN	80	84	89	91	92
Sasaran Strategis 9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal						
1	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75	77	80	82	85
Sasaran Strategis 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN						
1	Status akreditasi	-	-	20	60	100
2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3
Sasaran Strategis 11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel						
1	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	93.4	94.15	94.85	95.55	96.25
2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. PK merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan *monitoring* pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. PK disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Rincian PK PPPOMN Tahun 2021 tercantum di dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPPOMN

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder	1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	76
		2. Persentase Pemenuhan <i>Grand Design</i> (GD) penguatan laboratorium BPOM	5
	2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	86
Internal Process	3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar kemampuan laboratorium	75
	4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74
		2. Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	77
	5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	87
	6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,06
	7. Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<i>Learning & Growth</i>	8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	92
		2. Nilai AKIP PPPOMN	84
	9. Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	77
	10. Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,00
	11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,15
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91 %)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada triwulan III ini terdapat pemotongan anggaran APBN IV yang cukup besar yaitu sebesar Rp 16.364.419.000, 00 (Enam belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu rupiah) sehingga dilakukan penyesuaian target di beberapa output karena adanya perubahan anggaran pada 4 (empat) indikator yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP; 2) Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan; 3) Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar; 4) Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif;

Selain itu, menindaklanjuti adanya surat revisi target indikator pada level *Learning Growth* (LG) dari unit penanggungjawab terkait, maka diperlukan penyesuaian target pada indikator tersebut. Surat terkait penyesuaian target indikator tersebut sebagaimana pada lampiran 4.

Berikut usulan perubahan Perjanjian Kinerja eselon II

Tabel 4. Usulan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPPOMN

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<i>Stakeholder</i>	1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Nilai pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	76
		2. Persentase Pemenuhan <i>Grand Design</i> (GD) penguatan laboratorium BPOM	5
	2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	90
<i>Internal Process</i>	3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP/SKL	70
	4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1.Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74
		2.Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	76,02
	5.Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	87
	6.Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1.Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92
		2.Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,20
	7.Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	50
<i>Learning & Growth</i>	8.Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	79,2
		2. Nilai AKIP PPPOMN	77,2
	9.Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86
	10.Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,00

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,50
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91 %)

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Laporan Kinerja Interim pada triwulan III tahun 2021 PPPOMN disusun dalam rangka menyampaikan laporan hasil evaluasi kegiatan dalam triwulan III dalam tahun 2021. PPPOMN telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja. Pencapaian kesebelas sasaran strategis PPPOMN triwulan III tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Triwulan III Tahun 2021

Sasaran Strategis Indikator		Capaian				Keterangan
		Target	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi	
Sasaran Strategis 1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan						
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76	%	-	-	Perhitungan Capaian di Triwulan IV
2	Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium BPOM	5	%	-	-	Perhitungan Capaian di Triwulan IV
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN						
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	86	nilai	-	-	Perhitungan Capaian di Triwulan IV
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP						
1	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75	%	-	-	Perhitungan Capaian di Triwulan IV
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan						
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74	%	71	69,03	97,23
2	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	77	%	73	73,87	100,12

Sasaran Strategis Indikator		Capaian					Keterangan
		Target	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian	
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar							
1	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	87	%	49	53,5	73,59	
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan							
1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	92	96,25	104,62	
2	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,06	Nilai	-	-		Perhitungan Capaian di Triwulan IV
Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif							
1	Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57	%	14,3	35,7	124,5	
Sasaran Strategis 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN							
1	Indeks RB PPPOMN	92	Nilai	-	-		Perhitungan Capaian di Triwulan IV
2	Nilai AKIP PPPOMN	84	Nilai	-	-		Perhitungan Capaian di Triwulan IV
Sasaran Strategis 9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal							
1	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	77	Nilai	-	-		Perhitungan Capaian di Triwulan IV
Sasaran Strategis 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN							
1	Status akreditasi	-	-	-	Tahun 2022	Tahun 2022	
2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,00	Nilai	2,00	1,75	87,5	
Sasaran Strategis 11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel							
1	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	94,15	%	84	61,59	96,24	

Sasaran Strategis Indikator		Capaian					Keterangan
		Target	Satuan	Target Triwulan III	Realisasi	Capaian	
2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91%)	%	91	92	82,41	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 9 (sembilan) dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja sampai dengan Oktober 2021 (triwulan III) belum memiliki realisasi capaian. Nilai RB PPPOMN tahun 2021 belum dilakukan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Indikator kinerja utama terkait nilai kinerja anggaran untuk perhitungan EKA belum dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan sehingga pencapaian hanya menghitung nilai IKPA yang juga tidak menghitung kriteria capaian output dan RPD Halaman III DIPA.

Sasaran Strategis 1:
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

IKSS 1.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian

Dalam rangka penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 diterbitkan Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM berupa Keputusan Kepala Badan POM POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai 2024 dan telah dilakukan penerapannya di Balai POM dan PPPOMN. Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Sebagai upaya tindak lanjut pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium, maka pada tahun 2021 disusun *road map* pemenuhan untuk 3 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Peralatan tahun 2021-2024. PPPOMN melakukan evaluasi terhadap *Road map* yang diusulkan Balai POM. Hasil evaluasi disampaikan ke Balai POM melalui pembahasan secara daring. PPPOMN juga berkontribusi dalam tercapainya pemenuhan *roadmap* tersebut, antara lain melakukan pembinaan ke Balai POM melalui pelatihan dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian, peningkatan kompetensi Balai

POM, menyelenggarakan Uji Profisiensi/Kolaborasi sesuai parameter ruang lingkup pengujian sehingga diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan nilai pemenuhannya.

Terkait pemenuhan peralatan, PPPOMN memberikan rekomendasi peralatan Balai POM sesuai standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemenuhan standar ruang lingkup di BB/BPOM, PPPOMN memberikan masukan ke Kedeputian untuk parameter uji yang belum masuk di Pedoman Sampling.

Cara perhitungan Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian adalah jumlah rata-rata nilai pemenuhan SKL PPPOMN dan rata-rata nilai pemenuhan SKL BB/BPOM. Nilai pemenuhan SKL PPPOMN dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan: SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing laboratorium (Obat, NAPPZA, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Mikrobiologi dan Biologi Molekuler, dan Produk Biologi). Nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan: SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing Balai.

Pengukuran capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian dilakukan mulai triwulan I, namun pelaksanaan penilaian SKL di BB/BPOM dilakukan pada triwulan IV. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan di triwulan III adalah monitoring pemenuhan SKL PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM sesuai *roadmap* yang sudah ditetapkan dan disepakati melalui *desk*. Dengan dilakukan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengawal tercapainya pemenuhan SKL sesuai target akhir tahun 2021 yaitu 76%.

Dari monitoring dan evaluasi *Roadmap* pada triwulan III ini didapatkan capaian SKL PPPOMN sebesar 78.31%, sedangkan Balai Besar/Balai POM 71.7%, sehingga progres capaian Pemenuhan SKL pada triwulan III adalah 75,10%. Hasil monitoring evaluasi ini digunakan sebagai acuan tindak lanjut intervensi untuk pemenuhan SKL pada triwulan berikutnya.

IKSS 1.2 Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM

Penyusunan *grand desain* penguatan laboratorium BPOM merupakan strategi dalam rangka memperkuat laboratorium. *Grand Design* (GD) memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Target pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM tahun 2021 adalah sebesar 5% yang berupa dokumen *grand design* penguatan laboratorium BPOM, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *grand design* laboratorium pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022-2030.

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2021 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, pencapaian target diukur pada akhir tahun atau triwulan IV, sehingga untuk triwulan III belum dilakukan pengukuran capaian kinerja. Namun pada triwulan III telah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu penyusunan dokumen Grand Design secara swakelola oleh Tim *grand design* penguatan laboratorium Badan POM dengan mengundang narasumber terkait. Penyusunan dokumen secara swakelola dilakukan karena adanya kegagalan lelang pengadaan jasa konsultan penyusunan dokumen Grand Design. Pada Bulan September sudah dilakukan pengisian kuisioner dengan Responden dari laboratorium internal (Balai Besar/Balai POM) dan Laboratorium Eksternal (Perguruan tinggi, Laboratorium Swasta dan Laboratorium Kementerian/lembaga). Capaian akan diukur di akhir tahun, progress capaian output triwulan III sebesar 72% dari target akhir tahun atau sebesar 3,6%.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN

IKSS 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di PPPOMN

Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM dan mengacu pada pedoman terkini (saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Dalam hal pelayanan publik, PPPOMN telah berkontribusi menunjang kebutuhan baku pembanding kimia, baku mikroba dan hewan uji dalam pengawasan mutu internal di industri obat dan makanan maupun pada riset dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa. Layanan uji profisiensi, kalibrasi alat dan pelatihan terkait teknis laboratorium juga menunjang kegiatan stakeholder eksternal dari lintas K/L maupun dari laboratorium pengujian lain di luar BPOM. Demikian halnya dengan layanan pengujian yang dilakukan oleh PPPOMN. Bahkan pada masa pandemi covid 19, PPPOMN melakukan pengujian sampel spesimen covid 19 dari berbagai pihak.

Capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN akan dihitung di akhir tahun 2021 dengan target sebesar 86,00. Oleh karena itu capaian di triwulan III belum

dapat di tetapkan. Namun dalam upaya peningkatan pelayanan publik, PPPOMN senantiasa melakukan survei umpan balik pelanggan pengguna layanan. Survei umpan balik dilakukan setelah pelanggan menerima layanan publik dengan membagikan link berbasis *google drive* dengan nama SIKEPO (Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan Online) dengan alamat: bit.ly/SurveiPPPOMN. Penilaian atas kualitas pelayanan dan saran serta masukan dari pelanggan menjadi landasan bagi PPPOMN untuk melakukan perbaikan dan inovasi agar selalu memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan survei umpan balik pelanggan pada triwulan III Tahun 2021 diperoleh data pelanggan sebanyak 38 pelanggan (sebagai populasi) dari tujuh jenis layanan publik PPPOMN. Pada pengukuran nilai SKM jumlah data yang digunakan sesuai dengan Tabel Krejcie & Morgan yang dapat dilihat pada tabel 6. Nilai SKM tiap layanan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 6. Responden SKM Menurut Tabel Krejcie & Morgan

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH POPULASI	JUMLAH RESPONDEN MENURUT TABEL KREJCIE & MORGAN
1	Pembelian Baku Pembanding BPFI	10	10
2	Layanan Kalibrasi	5	5
3	Layanan Pengujian	2	2
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	2	2
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	1	1
6	Layanan Uji Profisiensi	18	18
7	Layanan Pelatihan	-	-
Jumlah		38	38

Perolehan nilai SKM pada triwulan III Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Nilai SKM Tiap Layanan pada Triwulan III Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Nilai SKM
1	Pembelian Baku Pembanding BPFI	85,93
2	Layanan Kalibrasi	94,07
3	Layanan Pengujian	86,11
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	84,26
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	81,48
6	Layanan Uji Profisiensi	91,36
7	Layanan Pelatihan	-
	Rata-rata	87,20

Kategori Nilai SKM

	Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)	: 88,31 – 100,00	(3,54 – 4,00)
	Mutu Pelayanan B (Baik)	: 76,61 – 88,30	(3,07 – 3,53)
	Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)	: 65,00 – 76,60	(2,61 – 3,06)
	Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)	: 25,00 – 64,99	(1,00 – 2,60)

Nilai SKM tiap jenis layanan yang diperoleh dari jumlah responden sebanyak 38 orang berkisar antara 81 – 95 dengan hasil pelayanan secara umum PUAS. Nilai SKM terendah pada Layanan Pembelian Hewan Uji dan tertinggi pada Layanan Jasa Kalibrasi. Rata-rata nilai SKM dari enam jenis layanan adalah **87,20** masuk dalam kategori Mutu Pelayanan **B (Baik)**.

Tabel 8. Nilai SKM Tiap Unsur Layanan pada Triwulan III Tahun 2021

No	Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Rata-rata
1	Kalibrasi	96,67	96,67	96,67	93,33	86,67	93,33	96,67	96,67	90,00	94,07
2	BPFI	93,33	91,67	85,00	85,00	83,33	81,67	85,00	88,33	80,00	85,93
3	Pengujian	83,33	91,67	83,33	91,67	83,33	91,67	83,33	83,33	83,33	86,11
4	Uji Profisiensi	90,74	90,74	92,59	92,59	90,74	90,74	92,59	90,74	90,74	91,36
5	Baku Mikroba	83,33	83,33	91,67	91,67	83,33	83,33	91,67	83,33	66,67	84,26
6	Hewan Uji	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	66,67	83,33	81,48
7	Pelatihan	-									
	Total	88,46	89,57	88,77	89,60	85,12	87,35	88,77	84,85	82,35	87,20

Dari tabel diatas terlihat unsur layanan yang nilainya paling rendah adalah unsur layanan Sarana dan Prasarana (U9). Perlu dilakukan analisis untuk perbaikan unsur sarana prasarana, khususnya pada layanan baku mikroba dan penanganan pengaduan pada layanan hewan uji, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Tabel 9. Saran dan Masukan Responden Pelayanan Publik pada Triwulan III Tahun 2021

Jenis Layanan		Saran dan Masukan
1	Jasa Kalibrasi	1 Peningkatan kompetensi petugas agar dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan
		2 Sudah cukup bagus
2	Pembelian Baku Pemandang	1 Sudah cukup baik, adminnya pun sangat membantu dan responnya pun cukup cepat

		<p>2 Pelayanan sudah sangat baik, harap dipertahankan. Untuk saran mungkin untuk layanan penjualan hewan coba bisa juga dilakukan seperti penjualan BPFI</p> <p>3 Untuk jalur COD mohon ongkir dpt diinformasikan resmi agar dpt dimasukkan ke biaya pembelian dan diterima oleh tim finance kami</p> <p>4 Kedepannya diharapkan juga menyediakan baku pembanding untuk impurity sesuai yg ada di FI</p> <p>5 Menambah item BPFI yg disediakan</p> <p>6 Pada COA baku pembanding yg di terbitkan sebaiknya di tambahkan keterangan tanggal expire date nya</p> <p>7 Ada beberapa baku pembanding yang kami butuhkan tidak tersedia. Kami harap baku pembandingnya lebih dilengkapi lagi. Atau setidaknya berikan informasi dimana kami dapat mendapatkan baku pembanding yang tidak tersedia di Infalabs ini.</p> <p>8 Semoga list baku pembanding nya di tambah karena sangat membantu sekali dalam pembelian baku pembanding</p> <p>9 Terus Tingkatkan, dan bukakan Hotline dengan No Mobile jadi tidak hanya text only tapi bisa call dan text only via Whatsapp</p> <p>10 CoA hendaknya dibuat dengan lebih baik, rapi menggunakan kertas kop Label hendaknya diperbaiki sehingga tampak lebih profesional, rapi, enak dilihat, dan awet tidak mudah terhapus, bisa merujuk pada label - label referance standard USP atau JPRS Sebaiknya dimunculkan notifikasi pada setiap penyelesaian tahapan transaksi agar pembeli bisa lebih aware. Overall, pelayanan sangat mudah digunakan dan bagus. Terima kasih</p>
3	Pengujian	<p>1 Pelayanan yang di berikan sudah baik, dan memberikan respon yang cepat pada saat di konfirmasi dan menjelaskan dengan detail.</p> <p>2 Pelayanan sudah bagus mohon di sustain</p>
4	Uji Profisiensi	<p>1 Kalau bisa sampel dikirim sakalian dengan petunjuk tekni, kami kadang masih terkendala karena operatornya bukan orang pengujian sehingga kami tidak bisa langsung menerima petunjuk teknis. terima kasih</p>

		2	Semoga pelayanan uji profisiensi melalui infalabs terjaga performanya.
		3	Agar materi uji dan jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan balai secara umum
		4	Tingkatkan lagi
		5	Dipertahankan kualitas yg sudah diberikan saat ini
		6	Harap pengguna jasa profisiensi diberi resi/ pemberitahuan kalau sampel akan dikirim
		7	Sudah baik
		8	Pelayanan tetap dipertahankan dan ditambah inovasi inovasi yg memudahkan pelanggan
		9	mohon aplikasi Infalabs dipermudah untuk pencarian judul UP, karena UP yg diikuti dari berbagai bidang sehingga harus berkali-kali mencari judul yang diinginkan.
		10	Baik
		11	Tetap dibuat survey kebutuhan UP tiap balai.
		12	Pada aplikasi infalabs, dalam pemilihan judul klo bisa langsung d buat judul, tidak hanya kode UP saja, misal untuk kode 525 itu sebenarnya uji profisiensi ALT pada OT, tapi kita tidak langsung tahu itu UP ALT OT. Kecuali kalau dibuka terlebih dahulu, apalagi kalau kita lupa dngan kode nya, jadi harus buka satu per satu kode agar tahu itu judul UP nya apa.
		13	Sudah cukup bagus
5	Pembelian Baku Mikroba	1	Lebih lengkap lagi untuk kebutuhan yg disediakan.
		2	Terus ditingkatkan sistem pelayanannya
6	Pembelian Hewan Uji	1	Tidak ada

Selain itu, telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat dan monev tindak lanjut SKM oleh inspektorat bulan April 2021 dengan hasil 92,66 (sangat baik). Sesuai surat dari Inspektorat Utama No. B-PI.06.7.71.03.21.58 Perihal Usulan Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021-2024 tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan perhitungan ulang dengan baseline SKM tahun 2020, Inspektorat menilai PPPOMN perlu melakukan revisi target SKM menjadi 91, namun PPPOMN memberikan masukan bahwa target Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 akan direvisi menjadi 90.

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya laboratorium BB/BPOM
yang memenuhi standar GLP

IKSS 3. Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP

GLP (*Good Laboratory Practice*) yang dimaksud adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tahun 2020-2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar peralatan. Laboratorium Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) yang memenuhi standar kemampuan laboratorium adalah laboratorium BB/BPOM yang mencapai nilai sama dengan atau lebih dari Cut off ($\geq 70\%$). Pemenuhan SKL diperoleh dari hasil asesmen laboratorium BB/BPOM menggunakan SKL Balai POM Tahun 2020-2024.

Pengukuran Capaian Indikator nilai persentase pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dilakukan pada akhir tahun. Progres Kegiatan di triwulan 3 ini adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengujian ke Balai Besar/Balai POM, Pengembangan Kemampuan Laboratorium untuk Balai Besar/Balai POM, pelaksanaan uji profisiensi/kolaborasi dalam rangka peningkatan pemenuhan SKL sebagai upaya intervensi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target SKL Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut :

1. Hitung persentase pemenuhan standar kemampuan laboratorium (rata-rata dari SRL, alat dan kompetensi) untuk masing-masing BB/BPOM
2. Hitung jumlah BB/BPOM yang memenuhi standar kemampuan laboratorium dengan nilai rata-rata $\geq 70\%$ (cut off) menggunakan standar kemampuan laboratorium (2020-2024)
3. Jumlah BB/BPOM yang memiliki nilai pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium $\geq 70\%$ dibagi jumlah keseluruhan BB/BPOM (33 BB/BPOM).

Dari monitoring dan evaluasi *Roadmap SKL* pada triwulan III dari 33 BB/BPOM ini didapatkan pemenuhan 25 Balai POM dengan capaian SKL di atas 70%

Diharapkan pada akhir tahun 2021 untuk BB/BPOM yang mencapai nilai SKL $\geq 70\%$ adalah 25 Balai POM atau 75% dari 33 BB/BPOM.

Analisis Keberhasilan

Di tahun 2021 dalam rangka pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM, PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan, sehingga dapat memberikan antisipasi dan solusi terhadap kendala pemenuhannya.

Sasaran Strategis 4:
**Meningkatnya Metode Analisis Pengujian
Obat dan Makanan yang Dikembangkan**

IKSS 4.1 Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan

Indikator sasaran strategis ini adalah persentase Metode Analisis (MA) yang dikembangkan terhadap kebutuhan. Indikator persentase MA yang dikembangkan, diukur dengan penambahan MA yang dikembangkan pada tahun berjalan yang diakumulasikan jumlah dengan tahun sebelumnya, kemudian dihitung peningkatannya terhadap total target MA yang akan dicapai pada tahun 2024 sejumlah 2.289 judul MA (100 %).

Pada triwulan III terjadi pemotongan anggaran APBNP di masa kondisi pandemik Covid 19, sehingga diusulkan penyesuaian total target MA yang akan dicapai. Target indikator persentase MA yang dikembangkan merupakan target akumulatif, yaitu persentase terhadap total target MA yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2024. Adanya pemotongan anggaran yang terjadi selama masa pandemi selama dua tahun berturut-turut (tahun 2020 dan 2021) sangat berdampak pada capaian MA yang dikembangkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sampai tahun 2024. Penyesuaian target yang diusulkan yaitu total MA yang dikembangkan sampai tahun 2024 yang sedianya berjumlah 2289 diusulkan menjadi 2196 judul MA.

Penambahan jumlah MA yang dikembangkan sampai dengan triwulan III yaitu 107 judul MA sehingga secara kumulatif menjadi 1580 MA, dengan rincian 37 judul dari Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, 12 judul dari Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Kimia Pangan dan Air, 15 judul dari Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, 34 judul dari Kelompok Substansi Pengembangan Pengujian Mikrobiologi dan Biologi Molekuler dan 9 judul Balai Pengujian Produk Biologi.

Pada triwulan III target pengembangan MA sebesar 71% dari target tahun 2024. Metode analisis berasal dari pengembangan oleh 4 (empat) laboratorium kelompok substansi dan Balai Pengujian Produk Biologi. Pembagian target pengembangan MA disesuaikan dengan SDM yang tersedia di masing-masing kelompok substansi dan Balai Pengujian Produk Biologi.

Pencapaian % realisasi MA yang dikembangkan sampai akhir triwulan III tahun 2021 diperoleh dengan perhitungan:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Metode Analisis kimia obat, bahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi, mikrobiologi, biologi molekuler (validasi/verifikasi) sampai bulan September tahun 2021}}{\text{Total Metode Analisis sesuai standar sampai dengan tahun 2024}}$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{107+1.473}{2289} \times 100\% = \mathbf{69,03\%}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{\mathbf{69,03}}{\mathbf{71}} \times 100\% \\ &= \mathbf{97,23\%} \end{aligned}$$

Jika diperhitungkan adanya penyesuaian target karena adanya pemotongan anggaran APBNP IV, maka perhitungan capaian % realisasi MA triwulan III adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{107+1.473}{2.196} \times 100\% = 71,95\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{71,95}{71} \times 100\% \\ &= \mathbf{101,33\%} \end{aligned}$$

Analisis Kendala dan Tindak Lanjut

Realisasi pengembangan MA sampai dengan triwulan III sebanyak 1.580 MA atau sebesar 69,03%. Target MA sampai dengan triwulan III yaitu 71%, sehingga terdapat gap 1,97%. Gap ini lebih besar dari triwulan sebelumnya yaitu 0,07% pada triwulan II. Hal ini disebabkan antara lain adanya keterlambatan pengiriman reagensia dan suku cadang dari penyedia pada kondisi pandemic sehingga menghambat capaian realisasi MA yang dikembangkan sesuai target. Disamping itu, adanya kerusakan peralatan/instrumen pada

Kelompok Substansi Kimia Pangan dan Air yaitu ICP-MS yang digunakan saat proses pengembangan MA, sehingga target MA pada Kelompok Substansi Kimia Pangan dan Air masih belum terpenuhi. Sebagai upaya tindak lanjut telah dilakukan pengajuan perbaikan alat tersebut dan menunggu perbaikan oleh teknisi.

Adanya pemotongan anggaran yang terjadi selama masa pandemi selama dua tahun berturut-turut (tahun 2020 dan 2021) sangat berdampak pada capaian MA yang dikembangkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sampai tahun 2024. Penyesuaian target yang diusulkan yaitu total MA yang dikembangkan sampai tahun 2024 yang sedianya berjumlah 2289 diusulkan menjadi 2196 judul MA. Pengurangan total target jumlah MA sebanyak 93 (2289 dikurangi 2196) sudah mempertimbangkan prioritas kebutuhan MA sampai tahun 2024, yaitu beberapa MA yang masih dapat ditunda dan akan dikembangkan pada RPJMN berikutnya.

IKSS 4.2 Persentase Baku Pembanding yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan

Baku Pembanding adalah bahan otentik dan seragam yang ditujukan untuk digunakan dalam uji kimia dan fisika khusus, untuk itu sifat-sifatnya dibandingkan melalui suatu pengujian dan mempunyai derajat kemurnian yang sesuai untuk tujuan tersebut (WHO). Penggunaan Baku Pembanding sangat penting dalam memberikan jaminan hasil pengujian terutama dalam konteks pengawasan postmarket Obat dan Makanan di Indonesia terutama dengan pemberlakuan ISO 17025 di seluruh laboratorium di lingkungan BPOM.

Pemenuhan Baku Pembanding adalah Baku Pembanding kimia dan mikroba yang mampu dikembangkan/diproduksi kembali dan uji ulang oleh PPPOMN untuk pengujian di Laboratorium BPOM. Baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada triwulan III tahun 2021 sebanyak 46 Baku Pembanding kimia dan 20 baku pembanding mikroba.

Pencapaian realisasi Baku Pembanding (kimia dan mikroba) yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada triwulan III tahun 2021 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi} &= \frac{a+b}{c+d} \times 100\% \\ &= \frac{(785+46)+(20)}{1122+30} \times 100\% \\ &= 73,87\%\end{aligned}$$

Keterangan:

a = Total baku pembanding kimia yang dikembangkan sampai dengan triwulan III 2021

b = Total baku pembanding mikroba yang dikembangkan sampai dengan triwulan III 2021

c = Total Baku Pembanding Kimia yang dikembangkan sampai dengan tahun 2024

d = Total Baku Pembanding Mikro yang dikembangkan sampai dengan tahun 2024

Persentase capaian IKSS pada triwulan III dihitung terhadap realisasi pemenuhan baku pembanding pada tahun 2020 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{73,09}{73} \times 100\% = 100,12\%\end{aligned}$$

Analisis Keberhasilan

Target Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan triwulan III tahun 2021 yaitu 73%, sedangkan realisasi sebesar 73,09% sehingga target sudah tercapai.

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

IKSS 5. Persentase Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai Standar

Target alat ukur laboratorium BPOM yang dikalibrasi pada tahun 2024 adalah 3.528 alat sedangkan target pada tahun 2021 sebesar 87% (3061 alat). Pada triwulan III, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 1.886 alat dengan capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alat yang dikalibrasi}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100\% \\ &= \frac{1.886}{3.528} \times 100\% = \mathbf{53,5\%}\end{aligned}$$

Berdasarkan RAPK, target persentase alat yang dikalibrasi pada triwulan III sebesar 72 % dari target akhir tahun 2021. Maka dapat dihitung % Capaian Indikator ini sebagai berikut :

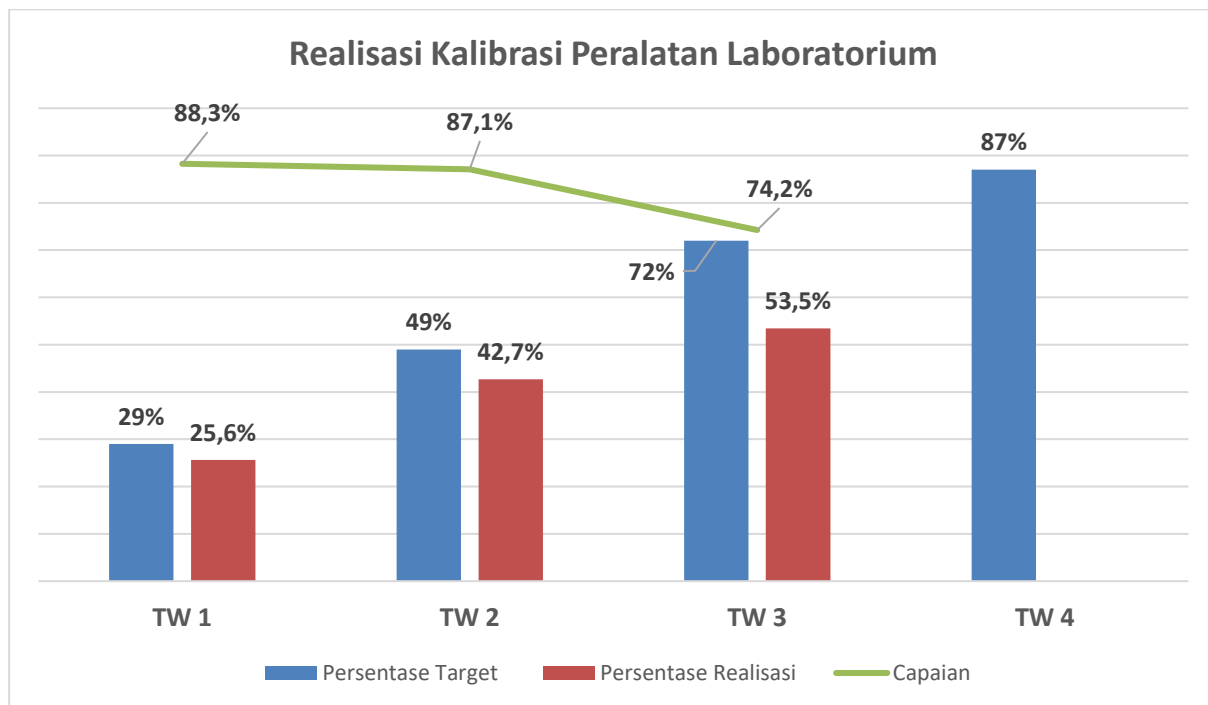
$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{53,5}{72} \times 100\% = \mathbf{73,59\%}\end{aligned}$$

Sampai Triwulan III, telah dilakukan kalibrasi dengan rincian seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Triwulan III Tahun 2021

Waktu Kalibrasi	Nama Balai / Lab.	Jumlah Alat
1. Januari		336
	DKI JAKARTA	85
	JAMBI	56
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	12
	PPPOMN - BBP	14
	PPPOMN - KONAPPZA	56
	PPPOMN - MBM	35
	PPPOMN - OTSKKOS	23
	PPPOMN - PANGAN & AIR	14
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	41
2. Februari		349
	BANJARMASIN	57
	DKI JAKARTA	4
	KUPANG	18
	PALANGKARAYA	60
	PALU	78
	PEKANBARU	77
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	4
	PPPOMN - BBP	1
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	50
3. Maret		218
	BANDA ACEH	58
	BPKP PROVINSI SULSEL	1
	DITWASDISYAN	2
	INSTALASI FARMASI DINKES PROVINSI SULSEL	1
	MATARAM	68
	PALU	4
	PPPOMN - BBP	5
	PPPOMN - KONAPPZA	5
	PPPOMN - PANGAN & AIR	1
	SERANG	73
4. April		260
	AMBON	66
	BANDAR LAMPUNG	56
	DENPASAR	92
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA	5
	PALU	11
	PANGKALPINANG	3

	PPPOMN - BALAI PENGUJIAN KHUSUS	25
	PPPOMN - MBM	2
5. Mei		43
	PANGKALPINANG	14
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	1
	PPPOMN - BALAI PENGUJIAN KHUSUS	2
	PPPOMN - MBM	18
	PPPOMN - OTSKKOS	2
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	2
	PPPOMN - SUBBAG TU	2
	PT. WAHANA REMPAH	2
6. Juni		300
	BATAM	65
	ENDE	11
	KENDARI	62
	MAKASSAR	73
	TANIMBAR	5
	YOGYAKARTA	84
7. Juli		11
	MATARAM	10
	MANGGARAI BARAT	1
8. Agustus		35
	Ende	3
	Palu	15
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	1
	PPPOMN - BBP	4
	PPPOMN - KOBONAPPZA	12
9. September		334
	KUPANG	70
	ENDE	24
	PALANGKARAYA	23
	MANOKWARI	46
	SOFIFI	14
	GORONTALO	20
	SURABAYA	70
	BANDUNG	67
GRAND TOTAL		1886



Gambar 10. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi

Analisis Kendala dan Tindak Lanjut

Pada triwulan III, capaian realisasi alat yang dikalibrasi terdapat gap sebesar 8,5% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli dan Agustus pelaksanaan kalibrasi in-situ ke Balai Besar/Balai POM terkendala karena adanya peningkatan kasus infeksi Covid-19.

Pada triwulan III pelaksanaan kalibrasi di 6 BB/Balai POM mengalami penundaan dan harus dilakukan penjadwalan ulang. Pelaksanaan kalibrasi baru dapat dilakukan pada bulan September dan Oktober, dengan mengirim dua tim sekaligus pada pekan yang sama, untuk melakukan kalibrasi in-situ di dua BB/Balai POM yang berbeda. Dengan terjadinya penundaan ini maka terjadi pergeseran penyelesaian pekerjaan, yang seharusnya selesai di triwulan III bergeser ke triwulan IV. Pergeseran ini menyebabkan terjadinya *gap* sebesar 8,5% dari target. Gap ini lebih besar dari gap pada triwulan I (3,4%) dan triwulan II (6,3%).

Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Pelayanan Pengujian
Obat dan Makanan

IKSS 6.1 Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Pelayanan pengujian obat dan makanan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari PPPOMN. Persentase sampel obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu menjadi parameter untuk dapat menilai peningkatan pelayanan pengujian obat dan makanan di PPPOMN. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 tahun 2020, pengujian sampel yang masuk di PPPOMN diuji oleh dua UPT PPPOMN, kecuali sampel obat dalam rangka PQ WHO yang diuji oleh Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif serta sampel dalam rangka jejaring pada masing-masing Kelompok substansi pengembangan pengujian di lingkungan PPPOMN.

UPT Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang produk biologi, memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengujian mutu produk biologi, pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, *bulk* vaksin dan produk biologi lainnya, pelaksanaan pengujian toksikologi obat dan makanan serta sistem rujukan laboratorium untuk pengujian produk biologi dan pengujian toksikologi, sedangkan UPT Balai Pengujian Khusus obat dan Makanan (BPKOM) melaksanakan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, dan/atau pengkajian obat dan makanan dalam lingkup nasional dan internasional serta pelaksanaan pengujian rujukan kimia termasuk sampel rokok, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat dan makanan dalam lingkup nasional dan internasional.

Sampel yang diterima oleh UPT di Lingkungan PPPOMN adalah:

1. Sampel dari Ditwas karena adanya dugaan pelanggaran di lingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya), perbedaan hasil uji antar laboratorium UPT BPOM dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Sampel dari Deputi IV dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Sampel dari UPT BPOM adalah sampel yang belum mampu diuji di semua UPT BPOM dalam rangka khusus/kasus/ investigasi, sampel uji absah DNA, dan vaksin dalam rangka pengawasan.
4. Sampel pihak ketiga dalam rangka uji khusus/kasus/ investigasi dan lot release.
5. Pengujian dalam rangka pengkajian Obat dan Makanan.

Pengujian sampel yang dilaksanakan oleh UPT BPPB dan UPT BPKOM hasilnya digunakan untuk tindak lanjut pengawasan terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat atau penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, sehingga hasil uji harus cepat diperoleh untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, oleh karena itu pemenuhan *timeline* pengujian sangatlah penting. Pada tahun 2021 PPPOMN menargetkan sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sejumlah 1.880 sampel, namun dengan adanya refocusing anggaran yang dikarenakan kondisi pandemik COVID-19, target sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu dikoreksi menjadi 1.710 sampel dengan target persentase pemenuhan *timeline* 92%.

Pemenuhan target sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada triwulan III sebesar 541 sampel dengan persentase pemenuhan *timeline* 92,64%, jika diakumulasi dengan pemenuhan triwulan I dan II, maka capaian target sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sampai dengan triwulan III sebesar 1.258 sampel dengan persentase pemenuhan *timeline* 96,25%. Data sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sampai dengan triwulan III tersaji pada tabel 11, tabel 12, dan tabel 13.

Tabel 11. Persentase penyelesaian sampel pengujian dan pelulusan

No.	Bulan	Pengujian	Pelulusan
1	Januari	100%	100%
2	Februari	100%	100%
3	Maret	100%	100%
4	April	100%	100%
5	Mei	100%	100%
6	Juni	100%	100%
7	Juli	100%	100%
8	Agustus	100%	100%
9	September	100%	100%

Tabel 12. Persentase sampel pengujian yang ditindaklanjuti tepat waktu

No.	Bulan	Total Sampel	Jumlah Sampel Selesai Uji	Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline	Persentase Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
1	Januari	28	19	16	84,21%
2	Februari	4	16	16	100%
3	Maret	25	20	20	100%

4	April	43	24	22	91,67%
5	Mei	61	18	18	100%
6	Juni	58	71	71	100%
7	Juli	25	19	19	100%
8	Agustus	99	69	46	66,67%
9	September	42	51	46	90,20%
Total		385	307	274	89,25%

Tabel 13. Persentase sampel pengujian dan pelulusan produk biologi, sampel pengujian obat dan makanan, serta sampel PQ-WHO secara keseluruhan yang ditindaklanjuti tepat waktu

No.	UPT	Total Sampel	Jumlah Sampel Selesai Uji	Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline	Persentase Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
1	BPPB	1.095	971	955	98,35%
2	BPKOM	385	307	274	89,25%
3	PQ-WHO	29	29	29	100%
Total		1.509	1.307	1.258	96,25%

Perhitungan realisasi dengan target *output* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline}}{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.258}{1.307} \times 100\% \\
 &= 96,25\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{96,25\%}{92\%} \times 100\% \\
 &= 104,62\%
 \end{aligned}$$

Analisis Keberhasilan

Persentase penyelesaian pengujian sampel obat dan makanan serta produk biologi yang ditindaklanjuti tepat waktu hingga triwulan III sebesar 96,25 %, dengan persentase capaian IKSS 104,62 %. Pada triwulan III ini capaian persentase realisasi dan persentase capaian IKSS sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian triwulan II (capaian

persentase realisasi triwulan II sebesar 99,17% dan persentase capaian IKSS sebesar 107,79%), hal ini disebabkan karena adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4, namun secara keseluruhan capaian persentase realisasi dan persentase capaian IKSS masih sesuai dengan target yang ditentukan. Dengan capaian IKSS sebesar 104,62 % menandakan capaian sasaran kinerja ini dalam kategori Baik (Baik = $90\% \leq x < 110\%$). Realisasi Indikator Kinerja ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan melebihi, dikarenakan adanya kebutuhan pengujian *lot release* vaksin COVID-19 yang harus segera diselesaikan (cito).

Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, serta berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.02.02.1.2.04.20.153 tahun 2020 tentang penugasan kepada PPPOMN dan BPOM di Gorontalo untuk melaksanakan pemeriksaan uji COVID-19, maka PPPOMN memiliki satu tugas tambahan, yaitu melaksanakan pemeriksaan *screening* pada spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19. Sampai dengan triwulan III 2021 data spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19 tersaji pada tabel 14.

Tabel 14. Data spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19 Triwulan III tahun 2021

No.	Bulan	Total Sampel	Jumlah Sampel Selesai Uji	Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline	Persentase Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
1	Januari	3.965	3.938	3.938	100%
2	Februari	3.563	3.498	3.498	100%
3	Maret	1.863	1.911	1.911	100%
4	April	1.137	1.157	1.157	100%
5	Mei	791	759	759	100%
6	Juni	1.395	1.396	1.396	100%
7	Juli	1.921	1.946	1.946	100%
8	Agustus	1.431	1.445	1.445	100%
9	September	706	719	719	100%
Total		16.772	16.769	16.769	100%

IKSS 6.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan 6) Inovasi

(7%). Penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Target Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN ditetapkan pada triwulan IV tahun 2021. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2021 telah dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM pada tanggal 7 Juli 2021 dengan hasil 4,34/A- (Sangat Baik). Beberapa rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja UPP BPOM adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Pelayanan

- ✓ untuk publikasi maklumat di media cetak sebaiknya lebih diperjelas terkait maklumat pelayanan P3OMN Publikasi melalui baliho sebaiknya dipasang pada area lebih strategis dan pada area pemerintahan lainnya.

2. Profesionalisme SDM

- ✓ Pada SK Ka Pusat P3OMN ditambahkan informasi tambahan jam kerja (*extra time*) untuk tahun 2022 Disarankan dalam ruang pelayanan disediakan "timer" untuk melihat waktu pelayanan lama atau cepat.

3. Sarana Prasarana

- ✓ Perlu ditambahkan data dukung CCTV.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik Publikasi

- ✓ Layanan di area publik dapat dilakukan pada tahun mendatang.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

IKSS 7. Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/keahlian.

Target jejaring tahun 2021 adalah 8 jejaring laboratorium, yaitu:

1. LRPII pengujian Bahan Tambah Pangan dalam Pangan Olahan

2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPI Pengujian Cemarkan Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI)
8. Jejaring Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2021 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, pengukuran dilakukan mulai pada triwulan II. Dengan adanya pemotongan anggaran, target jejaring tahun 2021 diusulkan penyesuaian/perubahan dari 8 (delapan) output jejaring menjadi 7 (tujuh) output jejaring, yaitu:

1. LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan
2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPI Pengujian Cemarkan Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)

Perubahan ini mempertimbangkan bahwa untuk Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) pada tahun 2021 baru diadakan pertemuan inisiasi/awal dan akan menjadi target Jejaring di tahun 2022.

Pemenuhan target jejaring pada triwulan III adalah 3 (tiga) Jejaring, yaitu LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan, Jejaring Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC) dan LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik species dalam Pangan Olahan. Jika diakumulasi dengan pemenuhan triwulan II, maka capaian realisasi target sampai triwulan III menjadi 5 Jejaring.

Perhitungan realisasi dengan target output sebelum pemotongan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah jejaring terealisasi}}{\text{Jumlah output jejaring th 2021}} \times \% \text{ target akhir tahun} \\
 &= \frac{5}{8} \times 57\% \\
 &= 35,6 \%
 \end{aligned}$$

Perhitungan realisasi dengan target output berdasarkan usulan penyesuaian setelah pemotongan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah jejaring terealisasi}}{\text{Jumlah output jejaring th 2021}} \times \% \text{ target akhir tahun} \\ &= \frac{5}{7} \times 50\% \\ &= 35,7 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{35,6 \%}{28,6 \%} \times 100 \% \\ &= 124,5 \%\end{aligned}$$

Analisis Keberhasilan

Pemenuhan 5 (lima) Jejaring ini melebihi target pada RAPK tahun 2021 triwulan III, yaitu target realisasi sebesar 28,6%, sedangkan pemenuhannya adalah 35,6% (dihitung terhadap output jejaring sebelum pemotongan anggaran), Persentase realisasi ini jika dihitung terhadap output jejaring setelah pemotongan anggaran menjadi 35,7%. Hal ini terjadi karena ada kegiatan dalam rangka Jejaring yaitu ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC) sudah terlaksana di TW III yang dilakukan secara daring.

Sasaran Strategis 8:

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN

IKSS 8.1 Indeks RB PPPOMN

Sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, BPOM senantiasa berupaya melakukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02.2.7.01.20.22 Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM. Atas dasar tersebut, PPPOMN berupaya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai RB pada 6

(enam) area perubahan dalam membangun ZI (Zona Integritas) untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik PPPOMN akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020-2024, PPPOMN senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian ZI, Opini BPK, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan penerapan RB, berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Target Indikator kinerja Indeks RB PPPOMN ditetapkan pada triwulan IV tahun 2021. Nilai indeks RB ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. PPPOMN melakukan *monev* internal setiap bulan untuk mengevaluasi progres rencana kerja kelompok kerja pada 6 (enam) area perubahan. Diharapkan dengan adanya *monev* internal, nilai indeks RB dapat dicapai sesuai target.

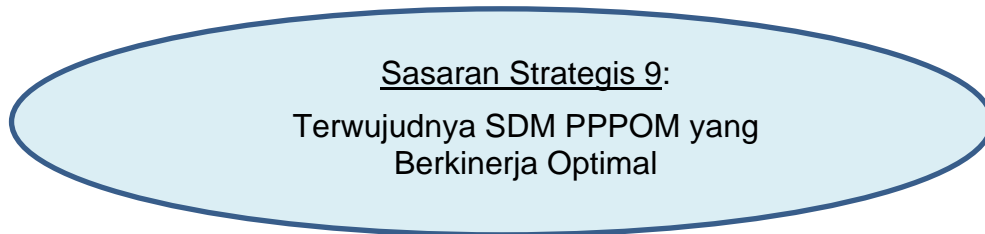
IKSS 8.2 Nilai AKIP PPPOMN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu implementasi area perubahan reformasi birokrasi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
5. Memberikan informasi kinerja pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Fokus evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*). Berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2021, perhitungan capaian Nilai AKIP belum dilaksanakan di triwulan III. Perhitungan capaian indeks tersebut dilakukan pada akhir tahun oleh Inspektorat. Desk

evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan POM tahun 2020 telah dilakukan oleh tim inspektorat pada tanggal 14 Juni 2021 dan tindak lanjut hasil desk sedang dievaluasi oleh inspektorat.



IKSS 9. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

Kualifikasi	• diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
Kompetensi	• diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
Kinerja	• diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
Disiplin	• diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun, sehingga perhitungan capaian indeks profesionalitas ASN pada triwulan III belum dapat dilaksanakan. Namun demikian, beberapa kegiatan yang menunjang IKSS 9 sudah dilaksanakan pada triwulan III, diantaranya sudah adanya pegawai yang menyelesaikan tugas belajar, melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, mengikuti seminar/*workshop*, serta telah dilaksanakannya penilaian prestasi kerja melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada triwulan III. Pada tahun 2021 PPPOMN menargetkan indeks profesionalitas ASN sebesar 77.

Sasaran Strategis 10:

Terkelolanya Laboratorium, Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN

IKSS 10. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal dihitung berdasarkan rata-rata dari penilaian berikut:

(1) Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi

a. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi – e-mail

- Aspek login dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu login per total akun individu.
- Aspek pemanfaatan (b) dengan bobot 40%, dihitung berdasarkan total akun unit aktif per total akun unit.
- Aspek pemanfaatan (c) dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu aktif per total akun individu.

b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – BOC

- Persentase aktivitas akses BOC
- Persentase aktivitas login BOC.

(2) Nilai indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC:

- Jumlah frekuensi verifikasi data.

Perhitungan capaian indeks tersebut dilakukan setiap triwulan oleh Satker Pusdatin BPOM. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang optimal triwulan III tahun 2021 didapatkan 1,75. Target di tahun 2021 yaitu 2,00 selama tahun berjalan. Oleh karena itu, capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\% \\ &= \frac{1,75}{2,00} \times 100\% \\ &= 87,5\%\end{aligned}$$

Analisis Kendala dan Tindak Lanjut

Indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal tidak dapat mencapai target di triwulan III, dikarenakan rendahnya aspek penggunaan/login e-mail

corporate dan pemanfaatan sistem informasi BPOM-BOC. Oleh karena itu, perlu diberikan penekanan kepada setiap pegawai melalui koordinator kelompok substansi dan kepala subbag TU agar dapat memanfaatkan fasilitas e-mail corporate secara maksimal. Diminta kepada seluruh pegawai melakukan login e-mail setiap hari dan diingatkan pada saat pelaksanaan apel mingguan. Selain itu, kepada admin BOC diharapkan untuk rutin memantau sistem BOC setiap bulan.

Sasaran Strategis 11:
Terkelolanya Keuangan PPPOMN
yang Akuntabel

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan dari nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen. Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu:

- (1) Nilai kinerja anggaran PPPOMN dan
- (2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN.

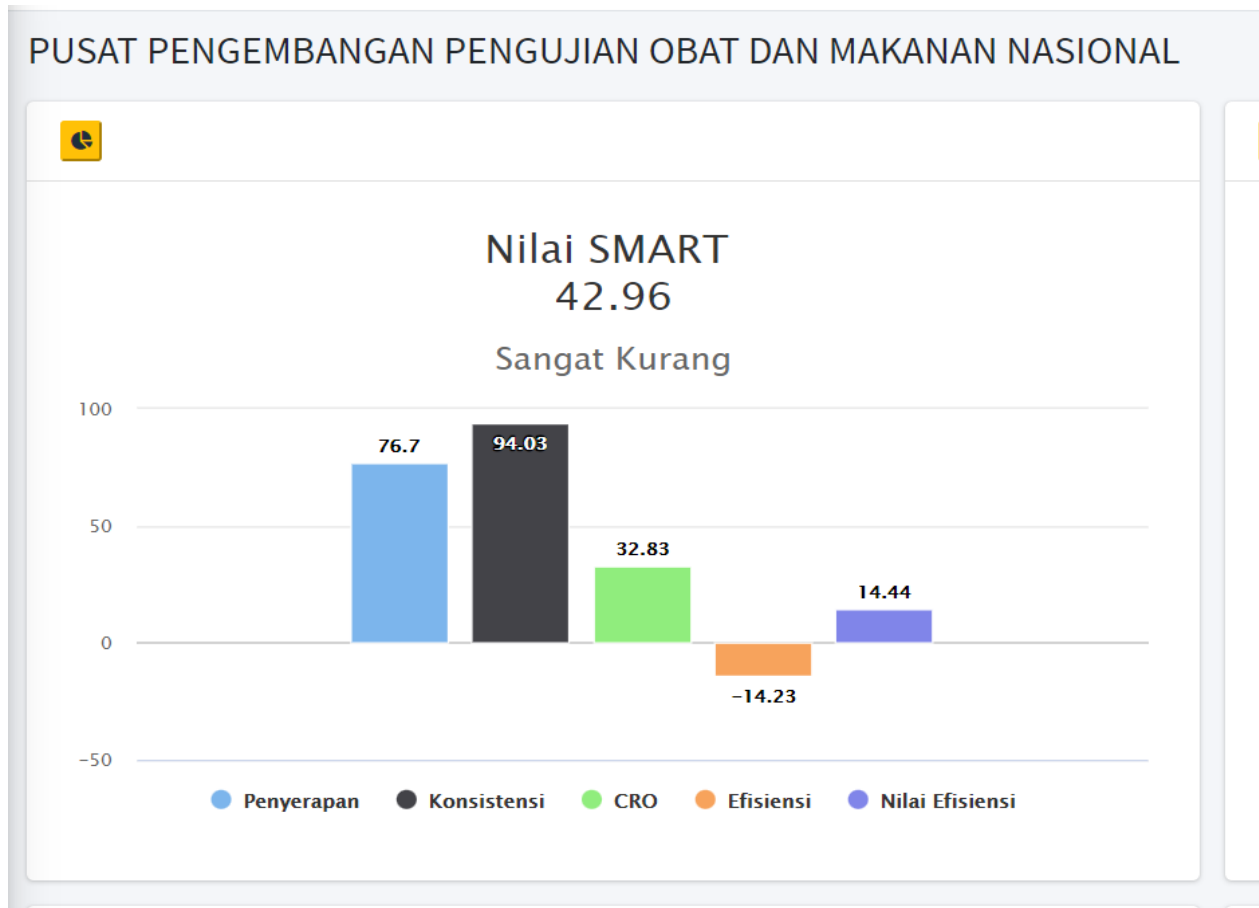
IKSS 11.1 Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian *Output*.

Cara perhitungan indikator nilai kinerja anggaran PPPOMN adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran PPOMN sebagai berikut:



MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER**

NO	KODE HPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI			EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)			
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPI	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT				RETUR SPI	RENKAS	KESALAHAN SPI
1	175	632420	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Nilai	83.33	38.11	100.00	100.00	70.00	100.00	100.00	69.24	100.00	100.00	99.65	100.00	90.00	89.54	100%	89.54
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5			
				Nilai Akhir	4.17	2.91	5.00	10.00	5.60	5.00	5.00	10.39	10.00	17.00	4.98	5.00	4.50			
				Nilai Aspek	80.48			92.50			92.22				95.00					

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PR/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$= (42.96 \times 60\%) + (89.54 \times 40\%)$$

$$= 25.78 + 32.82 = 61.59\%$$

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran untuk PPPOMN ada 6 Indikator yang belum optimal. 6 Indikator tersebut adalah:

1. Revisi Halaman III DIPA
Untuk revisi halaman III DIPA mendapatkan nilai yg belum optimal dikarenakan ada penambahan jumlah revisi DIPA yang dibatas. Hal ini karena adanya kesalahan dalam mencantumkan MAK belanja modal menjadi belanja bahan sehingga dibutuhkan revisi administrasi diluar waktu yang sudah ditentukan.
2. Deviasi Halaman III DIPA
Dalam halamam III DIPA terdapat nilai yang belum optimal dikarenakan adanya rencana yang belum sesuai dengan penarikan terutama dalam belanja modal Peralatan Laboratorium. Pengadaan Alat Laboratorium High Resolution Mass Spectrometry-Liquid Chromatography (HRMS-LC) senilai Rp. 15.180.000.000. Rencana pelaksanaan pekerjaan akah selesai pada Bulan Agustus , karena terkendala PPKM ada beberapa unit item barang yang tertahan dibea cukai sehingga menyebabkan terlambatnya sampai ke PPPOMN. Pelaksanaan pembayaran dilakukan paka bulan September diluar perencanaan yang sudah ditentukan.
3. Pengelolaan UP TUP
4. Serapan Anggaran
5. Retur SP2D
6. Kesalahan SPM

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	2021 (Triwulan III)		
			Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya Keuangan PPPOMN yang Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	107,06	84	61.59	96.24%

Capaian nilai kinerja anggaran pada triwulan III tahun 2021 penghitungan capaian diukur dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran sampai dengan akhir September 2021.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pengelolaan keuangan dan anggaran
2. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA;
3. Pelaporan Capaian Output Kegiatan
4. Revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana; dan

Upaya tindak lanjut untuk tercapainya indikator ini di triwulan

berikutnya adalah:

1. Mempercepat realisasi pengadaan sehingga Indikator Realisasi Anggaran dapat dicapai sesuai dengan target.

2. Mengupayakan semaksimal mungkin meniadakan kesalahan dalam pembuatan SPM
3. Mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP
4. Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
5. Sosialisasi reformulasi IKPA terbaru dan bimtek evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA).

IKSS 11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPPOMN

Efektivitas dinilai sebagai gambaran mengenai kemampuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi belanja langsung x 100%
Target belanja langsung

Pengukuran Efisiensi Anggaran Implementasi pengukuran efisiensi pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan., hasil persentase dikategorikan kedalam beberapa tingkatan :

- a. Tingkat pencapaian diatas 100%: tidak efisien
- b. Tingkat pencapaian 90% - 100%: kurang efisien
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90%: cukup efisien
- d. Tingkat pencapaian 60% - 80%: efisien
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60%: sangat efisien

Tabel Capaian IKU Tingkat Eisiensi Anggaran PPPOMN

IKU	Tingkat Efisiensi Anggaran PPPOMN					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	91	91	91	91		
Realisasi	75	92	92	-		Realisasi tingkat Efisiensi Anggran 92 % masuk ke dalam kategori Efisien
Capaian	82.41		-	-		

3.2 Capaian Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2021

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2021 pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial. Selain itu dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, diinstruksikan setiap Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang K/L.

Pada tahun 2021 triwulan I PPPOMN memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.105.370.538.000. Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai sebesar Rp24.126.484.000, Belanja Modal Rp 48.022.572.000 dan Belanja Barang Rp.33.221.482.000. Pada tanggal 26 Mei 2021 dilakukan Penghematan Belanja Pegawai terkait adanya Penghematan Anggaran dalam Tunjangan Kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 senilai Rp. 1.544.000.000,- sehingga anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp. 103.826.538.000.

Pada bulan Juli dilakukan Penghematan APBNP ke III dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM sehingga pagu anggaran PPPOMN dari Rp. 103.826.538.000 menjadi Rp. 98.911.119.000.

Pada Agustus Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat dan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021. Anggaran PPPOMN dari menjadi 98.911.119.000. 89.006.119.000.

Realisasi anggaran PPPOMN sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. 66,180,162,409 atau sebesar %. Nilai ini belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan Triwulan II yaitu senilai 74.35 %. Capaian ini diatas target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yaitu 60%. Hal ini dikarenakan adanya upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang semula dilaksanakan di triwulan IV dimajukan menjadi triwulan III. Demikian juga halnya dengan belanja bahan dengan melakukan pemisahan kontrak terhadap barang yang indent terlalu lama.

Rincian realisasi anggaran per *output* kegiatan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	IKSS	Nama IKSS	Anggaran per IKU	Realisasi anggaran Per IKU	Persen realisasi
SS1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 1	Nilai Persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	Rp 992.560.000	Rp 10.890.000	1,10
		IKSS 2	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	Rp 1.239.634.000	Rp 641.503.901	51,75
SS 2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPOMN	IKSS 3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPOMN	Rp 368.849.500	Rp 1.576.177.911	427,32
SS 3	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	IKSS 4	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium*	Rp 881.760.000	Rp 560.305.775	63,54
SS 4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	IKSS 5	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	Rp 15.175.197.500	Rp 25.443.423.666	167,66
		IKSS 6	Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	Rp 1.415.670.000	Rp 827.760.840	58,47
SS 5	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	IKSS 7	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Rp 957.920.500	Rp 333.897.839	34,86
SS 6	Meningkatnya Pelayanan pengujian Obat dan Makanan	IKSS 8	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rp 26.145.217.000	Rp 1.517.099.146	5,80
		IKSS 9	Indeks pelayanan publik PPOMN	Rp 5.215.161.700	Rp 936.554.167	17,96
SS 7	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	IKSS 10	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Rp 529.645.000	Rp 687.534.585	129,81
SS 8		IKSS 11	Indeks RB PPOMN	Rp 17.485.988.400	Rp 3.479.277.484	19,90

	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	IKSS 12	Nilai AKIP PPPOMN	Rp 3.858.302.100	Rp 6.979.567.061	180,90
SS 9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	IKSS 13	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	Rp 11.873.805.200	Rp 19.123.162.580	161,05
SS 10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	IKSS 14	Status akreditasi	Rp 100.200.000	Rp 72.258.250	72,11
		IKSS 15	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	Rp 308.032.200	Rp 52.703.200	17,11
SS 11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	IKSS 16	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	Rp 362.580.900	Rp 42.702.000	11,78
		IKSS 17	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Rp 22.017.000	Rp -	0,00
Total		-		Rp 86.932.541.000	Rp 62.284.818.405	71,65

Tabel 16. Capaian Kegiatan Per Indikator

sasaran strategis	Indikator	target 2021	Target Triwulan (kumulaif)		Realisasi Per Triwulan (kumulatif)			Capaian terhadap target TW (kumulatif) (%)	Capaian terhadap target tahunan (kumulatif)(%)
					s/d TW 3				
			s/d TW 3	s/d TW 4	pembilang	penyebut	realisasi	s/d TW 3	
Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76%	-	76%			akan diukur diakhir tahun , progres 13% dari target akhir tahun		
	Persentase pemenuhan Grand Design (GD) penguatan laboratorium BPOM	5%	-	5%	-		akan diukur diakhir tahun , progres 27% dari target akhir tahun atau 1.3%		
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di PPPOMN	86	-	86	-	-			
Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar (GLP)	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75%	-	75%	-	-	akan diukur diakhir tahun , progres 41,33% dari target akhir tahun		
Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74%	71%	74%	1580	2183	72,38%	106,44	97,81
	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan	77%	73%	77%	834	1122	74,33%	104,69	96,53
Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	87%	72%	87%	1886	3528	53,46%	109,10	61,45
Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	92%	92%	1258	1307	96,25%	104,62	104,62
	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,06	-	4,06	-	-	Akhir tahun		
Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian	Persentase jejaring laboratorium Pengujian Obat	57%	26,6	57%	3	13	23,08%	100,00	40,49%

Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	dan Makanan yang berpartisipasi aktif								
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN	92	-	92%	-	-			
	Nilai AKIP PPPOMN	84	-	84	-	-			
Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	77	-	77	-	-			
Terkelolanya Laboratorium, data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal	2	2	2	-	-	1,75	87,5	87,5
Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	94,15	84	94,15	61,59	1	61,59	96,24	65,42
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	91%	91%	91%	92 %	1	95%	104,40	104,40

Tabel 17. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output

o	Kegiatan	Output	Satuan	Volume Output			Anggaran			Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	Kemitraan	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	Jejaring	7	3	42,86	1.088.077.000	680.822.761	63%	adanya PPKM pelaksanaan kegiatan laboratorium terkendala		Juni = 2, Juli = 0, Agustus progres kegiatan TW 3: output 3 Jejaring 1. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan 2. Jejaring Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC) 3. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik species dalam Pangan Olahan
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	MA	152	107	70,39	39.580.789.000	34.967.604.494	88%	untuk pengadaan belanja modal SRM senilai 24 juta terhambat di Bea Cukai, meminta surat keterangan untuk menjelaskan bahwa alat itu adalah alat kesehatan , Bimtek Kalibrasi akan dilaksanakan pada bulan November	Melakukan pengembangan MA TW 3	Jan - Maret (TW 1) = 42, April-Juni (TW)2 = 40 Juli = 7 Agustus = 4, September 14 MA , Total MA sampai dengannTW 3 adalah 107 dari 152 MA . Sidang Pleno Metode Analisis Pertama sudah dilakuakn pada minggu ke 4 September - Alat Lab HRMS sudah proses pembayaran .
3	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar	Alat Lab	2893	1886	65,19	993.845.000	333.897.839	34%			(jan-maret) TW 1 = 903 , april = 260 . Mei = 44 juni = 299 , Juli = 11 Agustus = 35 , sept 334pengadaan alat sudah dilakukan pengdaan menunggu pengiriman barang Rp. 595.100.000 (strobosco) senilai 88 juta

		Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	sampel	1710	1258	73,57	6.289.560.000	2.561.577.867	41%	<p>Kendala :</p> <p>1. Paket pengadaan belum dapat diusulkan: Insentif penguji covid19 (masih proses legal drafting SK Ka Badan) dan Biaya Karantina/paket isolasi mandiri</p> <p>2. Paket pengadaan Reagen masih menunggu barang datang (1 paket)</p>	<p>Produk Biologi sapaai September : sampel yang masuk 1095 selesai uji 971 dan sampel yang memenuhi timeline 955</p> <p>BPKOM sampai dengn September : Total sampel masuk 385 sampel , total sampel yg selesai uji 307 , sampel yang memenuhi timeline 274</p> <p>PQ WHO sampai dengan September : 29</p> <p>Persen sampel yang memenihi timeline = $((955+274+29)/971+307+29) \times 100\% = 1258/1307 \times 100\% = 96,25\%$</p>
4	Sarana Bidang Kesehatan	Layanan Sarana Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Paket	80	78	97,50	1.080.106.000	834.108.840	77%		Sudah dilakukan pengadaan untuk belanja modal laptop dan lemari arsip
5	Penelitian dan Pengembangan Produk	Baku Pembandingan g dikembangkan	Baku Pembandingan	77	49	63,64	1.506.177.000	834.108.840	55%	Ada 4 Paket Baku Pembandingan masih dalam proses pengiriman barang, 3 onproes dan 1 Penyedia sudah masuk ke dalam batas waktu dan akan dikenakan denda	Jan = 0 Feb = 0 maret = 7, april = 8 , mei = 6, juni= 8, juli = 0. Agustus = 12 , September = 8 untuk pelaksanaan pengadaan belanja bahan menunggu bbrp barang datang

6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	Laboratorium	23	41.33 % target progres PCRO	Akhir Tahun	2.061.987.000	879.777.182	43%	Anggaran terbesar : Honor Penguji covid senilai 945.120.000 belum dapat dicairkan menunggu SK Ka Badan	Target Rincian Output dilakukan di akhir tahun/TW 4	setiap bulan dan TW dilakukan money pemenuhannya terhadap SKL berupa rapat-rapat pembahasan dengan ahli/narasumber, intervensi SRL dan kompetensi SDM Penguji, serta penyesuaian SRL dengan regionalisasi laboratorium. Hingga Agustus 2021, progres capaian rincian output sebesar 35.40 %
		Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	Laboratorium	1	Progres 72%	Akhir Tahun	1.221.634.000	641.503.901	53%		Target Rincian Output dilakukan di akhir tahun/TW 4	pada Bulan September sudah dilakukan pengisian kuisioner ke Responden yaitu laboratorium internal (BB/Balai POM) Lab External (Perguruan tinggi, Lab Swasta dan Lab Kementerian/lembaga)
7	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran PPPOMN	Layanan	1	0,75	75%	35.183.944.000	26.560.973.909	75%			
						Total	89.006.119.000	68.294.375.633	74.35%			

3.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

3.3.1. Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} = 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Hasil analisis efisiensi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Tingkat Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76	0	0,00	992.560.000	10.890.000	1,10	0,00	-1,00	75 %
2	Persentase pemenuhan Grand Design (GD) penguatan laboratorium BPOM	5	0	0,00	1.239.634.000	641.503.901	51,75	0,00	-1,00	75 %
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di PPPOMN	86	0	0,00	368.849.500	239.947.084	65,05	0,00	-1,00	75 %
4	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75	0	0,00	881.760.000	560.305.775	63,54	0,00	-1,00	75 %
5	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74	72,38	97,81	15.175.197.500	13.766.525.666	90,72	1,08	0,08	100 %
6	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan	77	74,33	96,53	1.415.670.000	827.760.840	58,47	1,65	0,65	90 %
7	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	87	53,46	61,45	957.920.500	333.897.839	34,86	1,76	0,76	90 %
8	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	96,25	104,62	15.792.273.000	9.040.606.467	57,25	1,83	0,83	88 %
9	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4	0	0,00	5.215.161.700	936.554.167	17,96	0,00	-1,00	75 %
10	Persentase jejaring laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	57	38,46	67,47	529.645.000	368.245.170	69,53	0,97	-0,03	75 %
11	Indeks RB PPPOMN	92	0	0,00	17.485.988.400	13.799.750.396	78,92	0,00	-1,00	75 %
12	Nilai AKIP PPPOMN	84	0	32,00	3.858.302.100	3.057.338.972	79,24	0,40	-0,60	75 %
13	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	77	0	37,00	11.873.805.200	10.419.560.804	87,75	0,42	-0,58	75 %
14	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal	2	1,75	35,00	100.200.000	72.258.250	72,11	0,49	-0,51	75 %
15	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	94	61,59	65,42	308.032.200	217.361.786	70,56	0,93	-0,07	75 %
16	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	91	95	104,40	362.580.900	247.546.394	68,27	1,53	0,53	92 %
	TOTAL			43,86	89.006.119.000	68.294.375.633	76,73	0,57	-0,43	75 %

Berdasarkan perhitungan efisiensi sampai dengan triwulan III tahun 2021, dari 16 indikator kinerja di PPPOMN terdapat 11 indikator kinerja yang tidak efisien . Diantaranya dikarenakan perhitungan pencapaian dilakukan pada akhir tahun.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Untuk kedepannya, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

3.3.2. Efektivitas

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

BAB IV - PENUTUP


4.1 Kesimpulan

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tahun anggaran 2021 memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator pada triwulan III terdapat beberapa indikator yang masih belum mencantumkan capaian, yaitu: Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian, Persentase pemenuhan Grand Design (GD) penguatan Laboratorium BPOM, Persentase pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP, serta beberapa indikator yang diukur berdasarkan hasil survei atau penilaian yang dilakukan oleh unit terkait yaitu, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN, Indeks RB PPPOMN, Nilai AKIP PPPOMN, Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN. Hal ini disebabkan indikator-indikator tersebut perhitungan capaian targetnya dilaksanakan pada akhir tahun. Untuk pengukuran Indeks Layanan Publik PPPOMN meskipun capaian realisasinya diukur di akhir tahun, namun pada triwulan III telah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM (Inspektorat) dengan hasil 4,34/A- (Sangat Baik). Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal telah dilakukan pengukuran pada triwulan III dengan nilai 1,75 dari target 2. Beberapa indikator yang belum tercapai target triwulan III telah dilakukan identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut untuk mengatasinya, sehingga diharapkan gap yang belum tercapai pada triwulan III segera dapat dipenuhi pada pencapaian target akhir tahun 2021.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan meningkatkan kinerja PPPOMN sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen *grand design* laboratorium BPOM perlu pengawalan lebih ketat dan dilakukan kontrol melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaannya, sehingga realisasinya dapat sesuai target yang sudah ditetapkan.
2. Perlu segera dilakukan perbaikan alat laboratorium ICP-MS di Kelompok Substansi Kimia Pangan Olahan dan Air yang mengalami kerusakan dan memanfaatkan peralatan lain yang tersedia sambil menunggu perbaikan, sehingga target Indikator Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan dapat tercapai.
3. Perlu terus diupayakan peningkatan pelayanan publik yang dapat memberikan kemudahan pelanggan dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan seperti pelayanan pengujian, penyediaan baku pembanding, kultur mikroba, hewan uji, dan



provider uji profisiensi serta kalibrasi alat laboratorium, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik dapat meningkat.

4. Perlu terus dilakukan pengawalan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai target pada akhir tahun 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
 Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatppomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Pihak Pertama
 Nama : Mohamad Kashuri. S.Si. Apt. M.Farm
 Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
 Disebut pihak pertama
 Nama : Dr. Penny K. Lukito. MCP
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

 Dr. Penny K. Lukito. MCP

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

 Mohamad Kashuri. S.Si.Apt.M.Farm

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
 Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatppomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium / Pengujian	76
		2. Persentase pemenuhan <i>Grand Design (GD)</i> penguatan laboratorium BPOM	5
2.	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN	86,00
3.	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar <i>GLP</i>	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar <i>GLP</i>	75
4.	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74
		2. Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	77
5.	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	87
6.	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,06
7.	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	92
		2. Nilai AKIP PPPOMN	84
9.	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	77
10.	Terkelolanya Laboratorium,	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,00

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427

BADAN POM Email : ppoamn@pom.go.id; sekretariat@ppoamn@gmail.com Website : www.pom.go.id

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	PPPOMN yang optimal	
11.	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN 2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	94,15 Efisien (91%)

Kegiatan

1. Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 105.370.538.000.-

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Penny R. Lukito, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Mohamad Kashuri, S.Si,Apt,M.Farm

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021				ANGGARAN
			B3	B6	B9	B12	(RUPIAH)
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	-	-	-	76	552.050.000
		2. Persentase pemenuhan <i>Grand Design (GD)</i> penguatan laboratorium BPOM	-	-	-	5	2.012.520.000
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN	-	-	-	86,00	451.729.700
3	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	-	-	-	75	1.628.393.500
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	66	68	71	74	26.222.825.500
		2. Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	69	71	73	77	2.740.460.000
5	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	29	49	72	87	974.077.000
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	92	92	92	27.782.343.500
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	-	-	-	4,06	5.171.717.200
7	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	-	14,3	28,6	57	1.348.566.500

8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	-	-	-	92	18.877.615.100
		2. Nilai AKIP PPPOMN	-	-	-	84	3.771.017.700
9	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	-	-	-	77	12.782.074.800
10	Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	-	-	-	2,00	529.705.800
11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	54	64	84	94,15	470.551.700
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	54.890.000

Jakarta, 9 Desember 2020
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Mohamad Kashuri. S.Si. Apt. M.Farm

Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
 Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
total_akun_individu	172	172	172	172	170	168
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1
total_individu_aktif	71	51	51	94	61	66
total_individu_login	71	51	51	94	61	66
total_unitbalai_aktif	1	1	1	0	1	1
Aspek Login (%)	12.38372093	8.895348837	8.895348837	16.39534884	10.76470588	11.78571429
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	0	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	12.38372093	8.895348837	8.895348837	16.39534884	10.76470588	11.78571429
Perhitungan (%)	64.76744186	57.79069767	57.79069767	32.79069767	61.52941176	63.57142857
Perhitungan per TW	60.11627907			56.37339587		
Nilai Indeks	1			1		

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Aktifitas						
Akses BOC (%)	0	45	60	30	15	0
Login BOC (%)	0	30	40	25	10	0
Total	0	75	100	55	25	0
Perhitungan per TW	58.33333333			42.5		
Nilai Indeks Per TW	1			0		

Nilai Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

	TW I			TW II		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Aktifitas						
Jumlah Frekuensi Verifikasi Data	1	1	1	1	1	1
Perhitungan (%)	100			100		
Nilai Indeks	3			3		

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi	
TW I	1
TW II	0.5
TW III	
TW IV	

Nilai Indeks Data dan Informasi yang Telah dimutakhirkan di BOC	
TW I	3
TW II	3
TW III	
TW IV	

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	
TW I	2
TW II	1.75
TW III	
TW IV	

Lampiran 4. Surat perubahan target IKM



Nomor : B-PI.06.7.11.04.21.103 Jakarta, 13 April 2021
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024

Yth.
 Kepala Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM (terlampir)
 di tempat

Sehubungan dengan perubahan Renstra Badan POM tahun 2020-2024, maka Inspektorat Utama melakukan perhitungan ulang target berdasarkan nilai SKM tahun 2020 (sebagai baseline) dan masukan target dari Unit Pelayanan Publik (UPP), dengan hasil penetapan target sebagai berikut:

Target semula

Indikator Kinerja Utama	Nilai SKM 2019 (Baseline)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SKM UPP Pusat	80,66	84,29	86,23	88,00	89,73	92,00
SKM UPP BB/BPOM	87,37	87,15	88,39	89,59	90,52	92,00
SKM UPP Loka POM	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00
SKM Badan POM	84,47	86,19	87,95	89,26	90,42	92,00

Perubahan target

Indikator Kinerja Utama	Nilai SKM 2020 (Baseline)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SKM UPP Pusat	83,46	85,27	86,23	87,20	88,17	
SKM UPP BB/BPOM	89,45	90,61	91,50	92,28	93,08	
SKM UPP Loka POM	-	86,93	88,17	89,27	90,47	
SKM Badan POM	87,00	88,46	89,45	90,35	91,29	

Rincian target nilai SKM Unit Pelayanan Publik Pusat dan BB/BPOM sebagaimana pada Lampiran 2.



Diharapkan agar UPP dapat menyesuaikan target SKM tersebut pada dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja serta dokumen perencanaan lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
 1. Sekretaris Utama
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Lampiran Surat
 Nomor : B-PI.06.7.11.04.21.103
 Tanggal : 13 April 2021

- Yth.
1. Direktur Registrasi Obat
 2. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
 3. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
 4. Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
 5. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 6. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 7. Direktur Pengawasan Kosmetik
 8. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 9. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
 10. Direktur Registrasi Pangan Olahan
 11. Direktur Pengawasan Peredaran pangan Olahan
 12. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
 13. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
 14. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 15. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
 16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 17. Kepala Balai Besar/ Balai POM di lingkungan Badan POM
 18. Kepala Loka POM Mandiri

NO	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM 2020	Target Semula (Surat Irtama 2 April 2020)					Menjadi (Sesuai perhitungan & masukan UPP)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
19	Balai Besar POM Di Pekanbaru	92,00	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
20	Balai Besar POM Di Palembang	91,74	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	91,75	92,00	92,50	93,00
21	Balai Besar POM Di Bandar Lampung	92,08	86,00	87,50	89,00	90,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
22	Balai Besar POM Di Jakarta	88,19	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
23	Balai Besar POM Di Bandung	85,91	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
24	Balai Besar POM Di Semarang	88,11	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
25	Balai Besar POM Di Yogyakarta	89,10	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	89,50	90,00	90,50	91,00
26	Balai Besar POM Di Surabaya	91,50	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	90,50	91,00	92,00
27	Balai Besar POM Di Serang	85,51	86,50	88,00	89,50	90,50	92,00	86,00	88,00	89,00	90,00
28	Balai Besar POM Di Denpasar	89,28	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	90,10	90,20	90,30
29	Balai Besar POM Di Mataram	90,51	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
30	Balai Besar POM Di Pontianak	89,32	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	90,50	91,00	92,00
31	Balai Besar POM Di Palangka Raya	89,40	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	91,00	92,00	93,00	94,00
32	Balai Besar POM Di Banjarmasin	89,18	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	91,00	91,50	92,00
33	Balai Besar POM Di Samarinda	85,16	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
34	Balai Besar POM Di Manado	88,12	82,50	84,00	86,50	88,50	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
35	Balai Besar POM Di Makassar	93,31	89,00	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	93,00	93,50	94,00
36	Balai Besar POM Di Jayapura	88,20	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	89,50	90,50	91,00	92,00
37	Balai POM Di Jambi	86,02	81,00	83,50	86,50	88,50	92,00	88,00	89,00	90,00	91,00
38	Balai POM Di Bengkulu	92,14	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	94,00	95,00	96,00	97,00
39	Balai POM Di Batam	86,69	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	88,00	89,00	90,00	91,00
40	Balai POM Di Kupang	87,02	84,00	85,50	87,50	89,50	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
41	Balai POM Di Palu	89,08	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	91,00	92,00	93,00	94,00
42	Balai POM Di Kendari	88,54	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
43	Balai POM Di Ambon	94,99	85,50	87,00	88,50	90,00	92,00	95,50	96,00	96,50	97,00
44	Balai POM Di Pangkalpinang	90,83	81,50	83,50	86,50	88,50	92,00	91,00	91,25	91,50	91,75
45	Balai POM Di Gorontalo	91,47	89,00	90,00	90,50	91,00	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
46	Balai POM Di Manokwari	99,09	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	99,00	99,00	99,00	99,00
47	Balai POM Di Mamuju	82,92	83,50	85,50	87,50	89,50	92,00	86,75	88,50	91,00	92,00
48	Balai POM Di Soffi	90,43	81,00	83,50	86,50	88,50	92,00	91,00	91,50	92,00	92,50
49	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	87,50	88,00	89,00
50	Loka POM di Kabupaten Banyumas	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
51	Loka POM di Kota Baubau	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00

Lampiran 2 Surat
 Nomor : B-PI.06.7.71.04.21.103
 Tanggal : 13 April 2021

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM 2020	Target Semula (Surat Irtama 2 April 2020)					Menjadi			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sekretaris Utama											
1	Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	85,30	79,50	83,00	86,00	89,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif											
2	Dit. Registrasi Obat	82,37	82,00	84,50	87,00	89,00	92,00	85,00	86,00	87,00	88,00
3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	85,16	85,00	86,50	88,00	90,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
4	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	88,01	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
5	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85,30	85,00	86,50	88,00	90,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik											
6	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81,36	79,00	82,00	85,00	88,00	92,00	83,00	84,00	85,00	86,00
7	Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	86,07	86,00	88,00	89,50	90,50	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
8	Dit. Pengawasan Kosmetik	83,63	83,50	86,00	87,50	89,00	92,00	84,00	84,50	85,00	85,50
9	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	-	-	86,00	88,00	90,00	92,00	80,00	81,00	82,00	83,00
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan											
10	Dit. Standardisasi Pangan Olahan	83,88	85,00	86,50	88,00	90,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00
11	Dit. Registrasi Pangan Olahan	82,60	85,50	87,00	88,50	90,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00
12	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	80,85	88,00	89,50	91,00	91,50	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00
13	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	89,40	85,50	87,00	88,50	90,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00
14	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,90	84,00	86,00	87,50	89,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00
15	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	89,51	84,50	86,00	87,50	89,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
16	Balai Besar POM Di Banda Aceh	93,44	85,00	87,00	88,50	90,00	92,00	95,00	96,00	97,00	98,00
17	Balai Besar POM Di Medan	89,87	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	91,00	92,00	93,00	94,00
18	Balai Besar POM Di Padang	89,97	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	90,50	91,00	92,00

NO	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM 2020	Target Semula (Surat Irtama 2 April 2020)				Menjadi (Sesuai perhitungan & masukan UPP)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
52	Loka POM di Kabupaten Bogor	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	86,00	89,00	90,00
53	Loka POM di Kota Dumai	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	83,00	84,00	85,00	86,00
54	Loka POM di Kabupaten Ende	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	85,00	87,00	89,00	92,00
55	Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	86,00	86,00	89,00	90,00
56	Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
57	Loka POM di Kabupaten Mimika	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
58	Loka POM di Kota Surakarta	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	85,00	86,00	87,00	88,00
59	Loka POM di Kabupaten Tangerang	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	86,00	88,00	89,00	90,00
60	Loka POM di Kota Tarakan	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
61	Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	86,00	88,00	90,00	92,00
62	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
63	Loka POM di Kota Palopo	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
Rata-rata BPOM (Pusat, Balai dan Loka Mandiri)		-	86,19	87,95	89,26	90,42	92,00	88,46	89,45	90,35	91,29

4. Dalam rangka upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan IPP UPP di lingkungan BPOM tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Rancangan Surat Sekretaris Utama BPOM hal Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Kinerja UPP di Lingkungan BPOM Tahun 2020. Kami mohon persetujuan Ibu pada surat terlampir.


Riati Anggriani, S.H., M.A.R.S., M.Hum.

REKAPITULASI INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP BPOM PUSAT

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	2019	2020
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,14	4,56
2	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategi Pimpinan	3,80	4,48
3	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	3,33	4,35
4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2,96	4,33
5	Direktorat Pengawasan Kosmetik	3,22	4,26
6	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2,91	4,24
7	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,26	4,24
8	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,85	4,21
9	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	2,70	3,98
10	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3,62	3,97
11	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,14	3,90
12	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,14	3,89
13	Direktorat Registrasi Obat	3,44	3,79
14	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	3,80

Lampiran I

REKAPITULASI INDEKS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

Satker	2019	2020
Unit Kerja Pusat	3,35	4,14
Balai Besar/Balai POM	3,33	4,00
Unit Kerja Eselon I		
Sekretariat Utama	3,71	4,23
Deputi I	3,17	3,98
Deputi II	3,13	4,25
Deputi III	3,51	4,18
IPP BPOM	3,33	4,04

REKAPITULASI INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP UPT BPOM

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	2019	2020
1	Balai Besar POM di Denpasar	3,59	4,52
2	Balai POM di Manokwari	2,80	4,38
3	Balai Besar POM di Mataram	3,48	4,31
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	3,98	4,29
5	Balai POM di Bengkulu	3,54	4,29
6	Balai Besar POM di Serang	3,41	4,25
7	Balai POM di Ambon	3,35	4,22
8	Balai Besar POM di Padang	3,36	4,21
9	Balai Besar POM di Samarinda	3,38	4,21
10	Balai Besar POM di Bandung	2,85	4,20
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	3,27	4,17
12	Balai Besar POM di Semarang	3,05	4,14
13	Balai Besar POM di Surabaya	4,14	4,11
14	Balai Besar POM di Pekanbaru	3,50	4,10
15	Balai Besar POM di Jayapura	3,34	4,08
16	Balai POM di Palu	2,94	4,02
17	Balai Besar POM di Jakarta	3,13	4,00
18	Balai POM di Gorontalo	3,46	3,96
19	Balai Besar POM di Makassar	3,33	3,95
20	Balai POM di Kupang	3,36	3,95
21	Balai POM di Pangkal Pinang	3,48	3,95
22	Balai Besar POM di Manado	3,36	3,91
23	Balai POM di Batam	3,59	3,91
24	Balai POM di Sofifi	2,96	3,86
25	Balai Besar POM di Medan	3,35	3,84
26	Balai Besar POM di Pontianak	3,42	3,83
27	Balai Besar POM di Palembang	3,36	3,80
28	Balai POM di Kendari	3,23	3,79
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	2,82	3,69
30	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,35	3,54
31	Balai Besar POM di Palangka Raya	3,46	3,52
32	Balai POM di Jambi	3,42	3,51
33	Balai POM di Mamuju	2,82	3,49

Lampiran II

Matriks Usulan Perubahan Target Indeks Pelayanan Publik BPOM Tahun 2021-2024

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya					Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,56	4,36	4,41	4,46	4,51	4,60	4,65	4,70	4,75	
2	Balai Besar POM di Denpasar	4,52	4,06	4,21	4,36	4,51	4,55	4,60	4,65	4,70	
3	Biro Hukum dan Organisasi	4,48	4,06	4,21	4,36	4,51	4,51	4,55	4,60	4,65	
4	Balai POM di Manokwari	4,38	3,46	3,81	4,16	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60	
5	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,35	3,76	4,01	4,26	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60	
6	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,33	3,46	3,81	4,16	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60	
7	Balai Besar POM di Mataram	4,31	3,76	4,01	4,26	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60	
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,29	4,36	4,41	4,46	4,51	4,40	4,51	4,55	4,60	
9	Balai POM di Bengkulu	4,29	4,06	4,21	4,36	4,51	4,40	4,51	4,55	4,60	
10	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,26	3,76	4,01	4,26	4,51	4,40	4,51	4,55	4,60	
11	Balai Besar POM di Serang	4,25	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
12	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,24	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
13	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,24	3,46	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya					Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
14	Balai POM di Ambon	4,22	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
15	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,21	4,06	4,21	4,36	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
16	Balai Besar POM di Samarinda	4,21	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
17	Balai Besar POM di Padang	4,21	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
18	Balai Besar POM di Bandung	4,20	3,46	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
19	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,17	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
20	Balai Besar POM di Semarang	4,14	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
21	Balai Besar POM di Surabaya	4,11	4,36	4,41	4,46	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55	
22	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,10	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,40	4,51	4,55	
23	Balai Besar POM di Jayapura	4,08	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,40	4,51	4,55	
24	Balai POM di Palu	4,02	3,46	3,81	4,16	4,51	4,20	4,40	4,51	4,55	
25	Balai Besar POM di Jakarta	4,00	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
26	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,98	3,46	3,81	4,16	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
27	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3,97	4,06	4,21	4,36	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya					Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
28	Balai POM di Gorontalo	3,96	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
29	Balai POM di Pangkal Pinang	3,95	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
30	Balai POM di Kupang	3,95	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
31	Balai Besar POM di Makassar	3,95	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
32	Balai POM di Batam	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
33	Balai Besar POM di Manado	3,91	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	
34	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,90	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
35	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,89	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
36	Balai POM di Sofifi	3,86	3,46	3,81	4,16	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
37	Balai Besar POM di Medan	3,84	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
38	Balai Besar POM di Pontianak	3,83	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
39	Balai Besar POM di Palembang	3,80	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
40	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,80	3,46	3,81	4,16	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
41	Direktorat Registrasi Obat	3,79	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya					Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
42	Balai POM di Kendari	3,79	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	
43	Balai Besar POM di Banjarmasin	3,69	3,46	3,81	4,16	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	
44	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,54	3,76	4,01	4,26	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	
45	Balai Besar POM di Palangka Raya	3,52	3,76	4,01	4,26	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	
46	Balai POM di Jambi	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	
47	Balai POM di Mamuju	3,49	3,46	3,81	4,16	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	
Rata-rata		4,04	3,77	4,02	4,26	4,51	4,21	4,34	4,46	4,55	
Target IPP BPOM			3,76	4,01	4,26	4,51	4,16	4,28	4,39	4,51	

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

NOTA DINAS
No. TL01.02.81.812.04.21.228

Kepada Yth. : Sekretaris Utama Badan POM
 Tembusan Yth. : 1. Deputi Bidang Penindakan
 2. Biro Perencanaan dan Keuangan
 Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Perihal : Laporan Kegiatan Sosialisasi SPBE BPOM bersama
 Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN
 Tanggal : 20 April 2021

Berdasarkan Nota Dinas kami sebelumnya nomor B-TL01.02.81.812.03.21.67 tanggal 29 Maret 2021 perihal Kegiatan Sosialisasi SPBE BPOM bersama Kementerian PAN dan RB (terlampir 2), BPPT dan BSSN, bersama ini kami laporkan hal – hal sebagai berikut:

1. Acara sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 April 2021 dengan dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN serta peserta dari 17 unit teknis di Pusat.
2. Dalam paparannya disampaikan bahwa penilaian SPBE dengan tools sesuai PermenPANRB terbaru nomor 59 tahun 2020, nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai saat menggunakan tools PerMenPANRB sebelumnya yaitu nomor 5 tahun 2018. Hal ini dikarenakan penilaian sudah dengan perluasan ruang lingkup dengan 47 indikator, dari sebelumnya 35 indikator.
3. Penilaian dengan tools baru ini menyebabkan adanya perbedaan nilai dan nilai indeks SPBE Nasional menjadi seakan – akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan indeks SPBE Badan POM, yang saat itu menggunakan tools SPBE lama telah mendapatkan nilai 3,68 di tahun 2019, setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan tools baru juga seakan - akan mengalami penurunan (terlampir 1). Hasil indeks SPBE dengan tools baru ini yang akan digunakan sebagai *baseline* pengukuran selanjutnya.
4. Terkait hal tersebut, diperlukan penyesuaian kembali terhadap target Renstra BPOM untuk Indeks SPBE. Bersama ini kami mengusulkan target terbaru (terlampir 1)

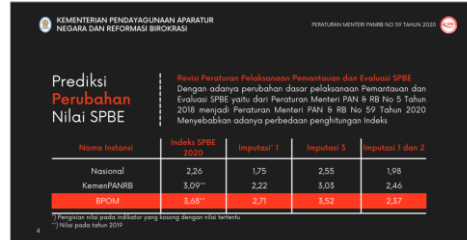
Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut, terima kasih.



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

Lampiran 1
Nota Dinas Nomor :

1. Simulasi KemenPAN dan RB terhadap capaian SPBE BPOM tahun 2019



2. Usulan target SPBE tahun 2021 – 2024, berdasarkan baseline simulasi KemenPAN dan RB

Tahun	2019	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Target	2,37	2,57	2,77	2,97	3,17	Tahun 2019, di ambil berdasarkan nilai inputasi 1 dan 2

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

NOTA DINAS
No. B-TL.01.02.81.812.03.21.67

Kepada Yth. : Sekretaris Utama Badan POM
Tembusan Yth. : Deputi Bidang Penindakan
Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Perihal : Kegiatan Sosialisasi SPBE BPOM bersama Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN
Tanggal : 29 Maret 2021

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka Badan POM perlu melakukan review kembali terhadap kebijakan SPBE yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai peraturan tersebut di atas, terdapat perluasan lingkup audit yang akan mulai diimplementasikan di tahun 2021. Penilaian yang sebelumnya dilakukan terhadap 35 indikator, saat ini menjadi 47 indikator, yang di dalamnya mencakup kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE.

Saat ini SPBE bukan hanya audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berfokus pada aplikasi, infrastruktur dan keamanan TIK dimana standarnya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun SPBE menjadi parameter penilaian tingkat kematangan keseluruhan sistem pada suatu organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh unit teknis dalam persiapannya.

Dalam rangka pendalaman pemahaman terhadap Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020, serta dimulainya penyusunan dokumen SPBE sesuai peraturan tersebut, maka Pusdatin akan melakukan sosialisasi dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan sharing dari narasumber ini maka Badan POM dapat lebih siap dalam persiapan audit SPBE ini. Berikut kami sampaikan juga draft undangan sosialisasi SPBE Badan POM untuk narasumber Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut. Terima Kasih.



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

7. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Indikator	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	77	79	81	83	Deputi I
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	73	75	77	79	Deputi II
3	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	76	78	80	81	Deputi III

**8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
(Mengacu Surat Inspektur Utama Nomor B-PL.06.7.71.04.21.103 Tanggal 13 April 2021 Perihal Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024)**

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	87	88	89	90
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	87	88	89	90
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	87	88	89	90
2.1	Direktorat Registrasi Obat	85	86	87	88
2.2	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	87	88	89	90
2.3	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	89	90	91	92
2.4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	87	88	89	90
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83,50	84,38	85,25	86,13
3.1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	84	85	86
3.2	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	87	88	89	90
3.3	Direktorat Pengawasan Kosmetik	84	84,5	85	85,5
3.4	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	80	81	82	83
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	84	85	86	87
4.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	84	85	86	87
4.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	84	85	86	87

12. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

(Mengacu Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.01.03.22.223.01.21.61 Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik UPP di Lingkungan BPOM)

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	4,51	4,55	4,60	4,65
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	4,51	4,55	4,60	4,65
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4,12	4,28	4,44	4,53
2.1	Direktorat Registrasi Obat	4,01	4,20	4,40	4,51
2.2	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	4,01	4,20	4,40	4,51
2.3	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,01	4,20	4,40	4,51
2.4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	4,45	4,51	4,55	4,60

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,37	4,37	4,46	4,55
3.1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,35	4,45	4,51	4,55
3.2	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,35	4,45	4,51	4,55
3.3	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,40	4,51	4,55	4,60
3.4	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	-	4,01	4,25	4,51
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,32	4,42	4,51	4,58
4.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,35	4,45	4,51	4,55
4.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,60	4,65	4,70	4,75
4.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,45	4,51	4,55	4,60
4.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,20	4,30	4,40	4,51
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,01	4,20	4,40	4,51
5	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,20	4,30	4,40	4,51

15. Indeks RB BPOM

a. Cascading Indeks RB BPOM Per Area Perubahan

No	Area Perubahan	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Manajemen Perubahan	4,61	4,66	4,71	4,75	PPSDM
2	Deregulasi Kebijakan	4,38	4,50	4,63	4,75	Settama (Biro Hukor)
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	7,39	7,41	7,43	7,45	Settama (Biro Hukor)
4	Penataan Tatalaksana	5,24	5,47	5,71	5,94	Settama (Biro Hukor)
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,13	5,59	6,04	6,50	Settama (Biro SDM)
6	Penguatan Akutabilitas	4,22	4,48	4,74	5,00	Settama (Biro Renkeu)
7	Penguatan Pengawasan	5,98	6,02	6,06	6,10	Ittama (Inspektorat I & Inspektorat II)
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,67	5,76	5,85	5,94	Settama (Biro Hukor)

b. Indeks RB Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	79,5	81,5	83,5	85,5
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	85,8	87,8	89,8	91,8
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	72,2	74,7	77,2	79,7
1.3	Biro Umum	82,2	83,2	84,2	85,2
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	82,5	83,5	84,5	85,5
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	75,0	78,5	82,0	85,5

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
2	Inspektorat Utama	80,6	81,6	82,6	83,6
2.1	Inspektorat I	77,0	78,0	79,0	80,0
2.2	Inspektorat II	84,1	85,1	86,1	87,1
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	86,7	88,3	89,9	91,5
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	85,3	87,3	89,3	91,3
3.2	Direktorat Registrasi Obat	86,1	88,1	90,1	92,1
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	84,4	86,4	88,4	90,4
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	90,2	91,2	92,2	93,2
3.5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	87,4	88,4	89,4	90,4
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	82,9	85,0	87,1	89,2
4.1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,8	86,3	88,8	91,3
4.2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,7	87,2	89,7	92,2
4.3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83,0	85,5	88,0	90,5
4.4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	80,0	81,0	82,0	83,0
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82,9	85,0	87,1	89,2
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89,0	90,1	91,2	92,3
5.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87,4	88,4	89,4	90,4
5.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97,7	98,2	98,7	99,2
5.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	84,5	85,5	86,5	87,5
5.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86,0	88,0	90,0	92,0
5.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	89,6	90,6	91,6	92,6
6	Deputi Bidang Penindakan	73,7	76,0	78,4	80,7
6.1	Direktorat Cegah Tangkal	79,9	83,4	86,9	90,4
6.2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	79,8	80,8	81,8	82,8
6.3	Direktorat Siber Obat dan Makanan	73,7	76,0	78,4	80,7
6.4	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	61,3	63,8	66,3	68,8

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	86,6	87,6	88,6	89,6
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	81,7	85,2	88,7	92,2
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,7	87,7	89,7	91,7
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	79,2	80,2	81,2	82,2

16. Nilai AKIP BPOM

a. Cascading Nilai AKIP BPOM Per Komponen Penilaian

No	Komponen Penilaian	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Perencanaan Kinerja	23,68	23,97	24,26	24,56	Settama (Biro Renkeu)
2	Pengukuran Kinerja	20,44	20,69	20,94	21,20	Settama (Biro Renkeu)
3	Pelaporan Kinerja	12,44	12,60	12,75	12,91	Settama (Biro Renkeu)
4	Evaluasi Internal	8,56	8,66	8,77	8,88	Ittama (Inspektorat I & II)
5	Capaian Kinerja	15,88	16,07	16,27	16,47	Settama (Biro Renkeu)

b. Nilai AKIP Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	83,0	85,3	87,6	89,9
2	Inspektorat Utama	82,3	84,8	87,3	89,8
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	79,7	82,2	84,7	87,2
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	79,3	80,8	82,3	83,8
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	77,8	79,3	80,8	82,3
6	Deputi Bidang Penindakan	79,7	81,2	82,7	84,2
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	77,2	78,7	80,2	81,7
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	76,6	78,1	79,6	81,1
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	77,7	79,2	80,7	82,2
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	81,9	84,4	86,9	89,4

17. Indeks Profesionalitas ASN BPOM
(Mengacu Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor PR.01.02.024.241.05.21.01 Tanggal 10 Mei 2021 Perihal Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM)

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	79,60	80,60	81,60	82,60
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	84,00	85,00	86,00	87,00
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	81,00	82,00	83,00	84,00
1.3	Biro Umum	74,00	75,00	76,00	77,00
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	78,00	79,00	80,00	81,00
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	81,00	82,00	83,00	84,00
2	Inspektorat Utama	84,28	84,72	85,15	85,58
2.1	Inspektorat I	87,10	87,15	87,20	87,25
2.2	Inspektorat II	85,75	86,00	86,25	86,50
2.3	Bagian TU Inspektorat Utama	80,00	81,00	82,00	83,00
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	82,60	83,33	84,06	84,77
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81,00	82,00	83,00	84,00
3.2	Direktorat Registrasi Obat	88,50	88,90	89,30	89,60
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	87,50	87,75	88,00	88,25
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78,00	79,00	80,00	81,00
3.5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	78,00	79,00	80,00	81,00
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	84,20	84,85	85,50	86,15
4.1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87,50	88,00	88,50	89,00
4.2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,00	86,50	87,00	87,50
4.3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82,50	82,75	83,00	83,25
4.4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	81,00	82,00	83,00	84,00
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	84,00	85,00	86,00	87,00
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	84,55	85,00	85,45	85,90
5.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,00	86,50	87,00	87,50
5.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	79,00	80,00	81,00	82,00

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
5.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,75	87,00	87,25	87,50
5.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	84,75	85,00	85,25	85,50
5.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,25	86,50	86,75	87,00
6	Deputi Bidang Penindakan	84,13	84,80	85,48	86,15
6.1	Direktorat Cegah Tangkal	84,00	84,50	85,00	85,50
6.2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	83,00	84,00	85,00	86,00
6.3	Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,50	86,70	86,90	87,10
6.4	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	83,00	84,00	85,00	86,00
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	86,00	86,25	86,50	87,00
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,50	86,70	86,90	87,00
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,50	85,75	86,00	86,25
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	77,00	78,00	79,00	80,00

18. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	2	2,25	2,5	3
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	2	2,25	2,5	3
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	2	2,25	2,5	3
1.3	Biro Umum	2	2,25	2,5	3
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	2	2,25	2,5	3
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	2	2,25	2,5	3
2	Inspektorat Utama	2	2,25	2,5	3
2.1	Inspektorat I	2	2,25	2,5	3
2.2	Inspektorat II	2	2,25	2,5	3
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
3.2	Direktorat Registrasi Obat	2	2,25	2,5	3
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	2	2,25	2,5	3
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2	2,25	2,5	3

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
3.5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2	2,25	2,5	3
4.4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	2	2,25	2,5	3
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
6	Deputi Bidang Penindakan	2	2,25	2,5	3
6.1	Direktorat Cegah Tangkal	2	2,25	2,5	3
6.2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
6.3	Direktorat Siber Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
6.4	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	2	2,25	2,5	3
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3

19. Nilai Kinerja Anggaran BPOM

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	93.0	93.6	94.2	94.8
2	Inspektorat Utama	93.9	94.5	95.7	96.9
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	97.2	97.3	97.4	97.5
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	92.3	92.9	94.1	95.3
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.9	92.5	93.7	94.9
6	Deputi Bidang Penindakan	93.0	93.6	94.8	96.0

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	93.5	94.1	95.3	96.5
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	90.7	91.3	92.5	93.7
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	92.2	92.8	94.0	95.2
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	93.0	93.6	94.8	96.0

20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Seluruh Unit Organisasi/Satker	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)

Lampiran 5. Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2020 Tahap IV



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : T-PR.03.01.10.106.07.21.507 Jakarta, 29 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2021 Tahap IV

Yth.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
c.q Bagian Perencanaan
di tempat

Sehubungan dengan surat dari Ibu Sekretaris Utama No. B-PR.03.01.2.21.07.21.363 Tanggal 26 Juli 2021, perihal Permintaan Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2021 Tahap IV, berikut kami kirimkan Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2021 Tahap IV beserta justifikasi nya pada satker Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Tembusan Yth.
Ibu Sekretaris Utama (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran

Surat Nomor : T-PR.03.01.10.106.07.21.507

KRO	RO	Satuan	DIPA TA 2021		APBN-P Tahap IV		Keterangan/Justifikasi
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
EAH - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001-Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	Layanan	25	2.692.760	23	2.061.987.000	Dengan adanya penyesuaian sistem kerja baru selama pandemi (WFH) untuk para penguji di lab BB/BPOM sehingga tidak menambah ruang lingkup pengujian
TAH - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001-Sistem laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan Grand Design	Layanan	1	2.000.000	1	1.221.634.000	1. Kegiatan yang semula dilakukan melalui pihak ketiga, dilakukan melalui swakelola 2. Kegiatan benchmark dan beberapa kunjungan ke Balai POM ditiadakan secara daring.
CAB - Sarana di Bidang Kesehatan	006-Layanan Sarana Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Paket	90	1.800.000	80	1.080.106.000	Adanya penghematan anggaran sehingga yang dilaksanakan pengadaan APD dalam rangka pengembangan pengujian
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	NSPK	200	51.520.237	152	39.580.789.000	1. Pengadaan peralatan, reagen dan baku pembanding yang ditunda sehingga pengembangan MA tidak dapat terlaksana seluruhnya 2. Penyesuaian waktu kerja (WFH) menyebabkan pekerjaan pengembangan MA di laboratorium tidak dapat terlaksana sesuai target
AEE - Kemitraan	001-Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Kesepakatan	8	1.234.258	7	1.088.077.000	Pengurangan anggaran untuk reagen kolaborasi metode pengujian dalam rangka partisipasi jejaring

KRO	RO	Satuan	DIPA TA 2021		APBN-P Tahap IV		Keterangan/Justifikasi
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
DDA - Penelitian dan Pengembangan Produk	001-Baku Pembanding yang dikembangkan	Produk	85	1.655.460	77	1.506.177.000	1. Pengurangan anggaran untuk pengadaan bahan baku serta pengurangan konsumsi untuk pembahasan yang dialihkan pelaksanaannya secara daring (full) 2. Penyesuaian waktu kerja (WFH) menyebabkan pekerjaan pengembangan baku pembanding tidak dapat dilaksanakan dengan optimal
BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001-Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Produk	3061	1.017.759	2893	993.845.000	1. Pengurangan anggaran 2. Penyesuaian waktu kerja (WFH) 3. Adanya pembatasan perjalanan sehingga tidak memungkinkan ke BB/BPOM
	002-Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	Produk	1880	6.595.727	1710	6.289.560.000	1. Kegiatan yang semula luring diubah menjadi daring 2. Efisiensi anggaran kegiatan 3. Penyesuaian waktu kerja (WFH) menyebabkan pekerjaan pengujian pembanding tidak dapat dilaksanakan dengan optimal